



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja
Direktorat Kearsipan Pusat
Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bidang kearsipan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional bidang kearsipan tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran keuangan yang memadai serta dukungan manajemen dari unit fasilitator. Peran ini tidak terlepas dari fungsi Direktorat Kearsipan Pusat sebagai satuan kerja yang mendukung tugas dan fungsi dari keseluruhan kegiatan di Arsip Nasional RI.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional RI bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Disamping ANRI, Direktorat Kearsipan Pusat sebagai salah satu unit di ANRI juga melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan

melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Kearsipan Pusat Tahun 2023.

Sebagai bagian dari struktur organisasi ANRI berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktorat Kearsipan Pusat harus memberikan pelaporan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumen ini merupakan Laporan Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat pada Tahun 2023.

1.2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup tugas ANRI sebagai penyelenggara negara di bidang kearsipan diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu penyelenggaraan kearsipan yang meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh SDM, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ruang lingkup dimaksud meliputi juga kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta lembaga kearsipan.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan adalah unsur pelaksana ANRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.

Direktorat Kearsipan Pusat sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan kearsipan pusat. Direktorat Kearsipan Pusat dipimpin oleh Direktur. Susunan organisasi Direktorat Kearsipan Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kearsipan Pusat menyelenggarakan fungsi:

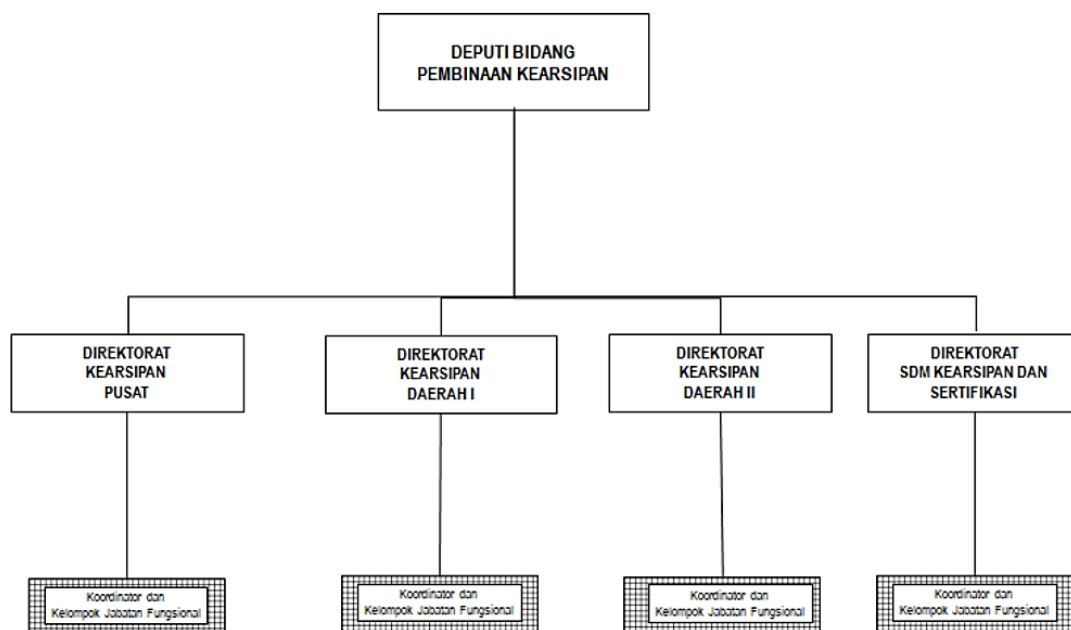
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi implementasi penyelenggaraan kearsipan, penerapan sistem informasi kearsipan, penggunaan prasarana dan sarana kearsipan, persetujuan atau pertimbangan Jadwal Retensi Arsip pada lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, pemberdayaan unit kearsipan dan lembaga kearsipan perguruan tinggi, serta pelaporan arsip terjaga;
2. Penyiapan pemberian bimbingan di bidang bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi implementasi penyelenggaraan kearsipan, penerapan sistem informasi kearsipan, penggunaan prasarana dan sarana kearsipan, persetujuan atau pertimbangan Jadwal Retensi Arsip pada lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, pemberdayaan unit kearsipan dan lembaga kearsipan perguruan tinggi, serta pelaporan arsip terjaga; dan

3. Penyiapan pengendalian di bidang bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi implementasi penyelenggaraan kearsipan, penerapan sistem informasi kearsipan, penggunaan prasarana dan sarana kearsipan, persetujuan atau pertimbangan Jadwal Retensi Arsip pada lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, pemberdayaan unit kearsipan dan lembaga kearsipan perguruan tinggi, serta pelaporan arsip terjaga.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Direktorat Kearsipan Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Pusat



Terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis di Direktorat Kearsipan Pusat, yang terbagi menjadi beberapa tim yaitu:

1. Tim Pembinaan Lembaga
2. Tim Pembinaan Perusahaan

3. Tim Pembinaan Perguruan Tinggi Negeri
4. Tim Pembinaan Arsip IKN
5. Tim Pembinaan Arsip Tematik
6. Tim Digitalisasi Arsip
7. Tim Dukungan Manajemen

1.4 Isu Strategis Organisasi

Peran Kearsipan dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Kebijakan pemerintah yang akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, akan membawa konsekuensi yang sangat besar di bidang kearsipan. Pertama, belum adanya platform penyelenggaraan kearsipan di IKN baru. Implementasi manajemen karsipan harus mampu mendorong berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Faktor penting yang akan mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah tersedianya sistem persuratan dan kearsipan dinamis, sebagai aplikasi umum yang dapat digunakan secara bersama (aplikasi bagi pakai) antar lembaga pemerintah pusat dan daerah. Selain aplikasi, diperlukan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Aplikasi ini akan memungkinkan integrasi dan komunikasi kedinasan akan berjalan secara komprehensif. Persuratan memiliki peran strategis karena merupakan sektor hulu dalam manajemen arsip secara keseluruhan. Kedua, perpindahan pusat pemerintahan ke IKN Baru harus tetap dapat dijamin keberlangsungannya. Penyelamatan arsip K/L yang pindah ke IKN baru, harus diikuti dengan penerapan manajemen arsip, sedemikian rupa sehingga data dan arsip tetap terkoneksi agar sewaktu-waktu diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pelayanan, tidak ada hambatan.

Penyelenggaraan kearsipan dapat memberikan sumbangsiah pada terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik yang prima melalui penyediaan dan pemanfaatan arsip secara bagi pakai dan terintegrasi dalam kerangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyediaan pelayanan pemanfaatan arsip akan dilakukan

melalui Aplikasi Umum SPBE Bidang Kearsipan yang dikembangkan oleh ANRI dan diterapkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Penyajian LAKIN terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran.

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis Organisasi

1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

2.5 Rencana Penarikan Dana

2.6 Metode Pengukuran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana strategis merupakan dasar untuk mengembangkan rencana dan melaksanakan sebuah tujuan yang ingin dicapai atau yang akan dilakukan. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 telah mengamanatkan bahwa Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kearsipan Pusat Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Strategis Direktorat Kearsipan Pusat

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN ANTARA/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET KELUARAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran Program :	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan kearsipan													
	-Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan						B							
Output Program:	Kapabilitas Organisasi Kearsipan													
	-Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		75 Rekomen dasi	121 Rekomen dasi	121 Rekomen dasi	121 Rekomen dasi	121 Rekomen dasi							
Kegiatan 2 : Pembinaan kearsipan lingkup pusat								1.950,0	2.305,8	1.786,5	1.670,0	150,0	Direktorat Kearsipan Pusat	
	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Pusat													
	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat		2,97	6,11	9,46	13,02	16,82							
	Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi di Pemerintah Pusat		36 Instansi	36 Instansi	40 Instansi	44 Instansi	41 Instansi	1.362,5	1.499,5	1.636,5	1.520,0			
	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset		10 Instansi	15 Instansi				437,5	656,3					
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti		25 Rekomen dasi	25 Rekomen dasi	25 Rekomen dasi	25 Rekomen dasi	25 Rekomen dasi	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		

Untuk tercapainya kinerja tersebut diatas dan terlaksananya tugas dan fungsi Direktorat Kearsipan pusat dalam peningkatan kapabilitas dan penyelenggaraan kearsipan intansi pusat, maka diperlukan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang mendukungnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun anggaran 2023 yang tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Kearsipan Pusat

No	Kegitan/KRO/RO	Target	Anggaran
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		
6660.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
6660.BDB.001	Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15 Lembaga	151.140.000
6660.BDB.002	Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	31 Lembaga	169.539.000
6660.PEA	Koordinasi		
6660.PEA.001	Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	4 Kegiatan	1.700.000.000
6660.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	53 Lembaga	
6660.QDB.001	Instansi pusat yang menerapkan aplikasi kearsipan berbagi pakai berbasis elektronik (SRIKANDI)	53 Lembaga	1.000.000.000
6660.QDB.002	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN	70 Lembaga	15.630.000.000

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan kedalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) Utama yaitu: Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (BDB), dan Koordinasi (PEA) dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (QDB). KRO

tersebut diturunkan ke dalam Rincian Output (RO) yang dikelompokkan menjadi 5 (lima), sebagai berikut:

1. Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset
2. Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan
3. Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI
4. Instansi pusat yang menerapkan aplikasi kearsipan berbagi pakai berbasis elektronik (SRIKANDI)
5. Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN

Direktorat Kearsipan Pusat memiliki 3 (tiga) RO Prioritas Nasional yaitu:

1. Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI
2. Instansi pusat yang menerapkan aplikasi kearsipan berbagi pakai berbasis elektronik (SRIKANDI)
3. Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian rewards atau penghargaan dan sanksi. Penetapan perjanjian kinerja Direktorat Kearsipan Pusat merupakan kesepakatan kinerja (kontrak kinerja) antara Direktur Kearsipan Pusat dan Deputi

Bidang Pembinaan Kearsipan. Direktorat Kearsipan Pusat telah memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Anggaran (Rp):

18.650.679.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyelamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyelamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Kedua,



Desi Pratiwi

Pihak Pertama,



M. Inam Mulyantono

Tabel. 2.4

Perjanjian Kinerja Revisi ke- 1 Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Anggaran (Rp):

18.625.829.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyclamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyclamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga

Jakarta, 14 November 2023

Pihak Kedua,



Desi Pratiwi

Pihak Pertama,



M. Imam Mulyantono

Perjanjian Kinerja tahun 2023 dilakukan revisi ke 1 sehubungan dengan perubahan alokasi pagu anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia akibat kebijakan nasional *automatic adjustment* APBN sesuai dengan DIPA Revisi XVI, dan POK Revisi XIX;

Tabel. 2.5

Perjanjian Kinerja Revisi ke- 2 Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Anggaran (Rp):

18.593.729.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyelamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyelamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga

Jakarta, 4 Desember 2023

Pihak Kedua,



Desi Pratiwi

Pihak Pertama,



M. Inam Mulyantoro

Perjanjian Kinerja tahun 2023 dilakukan revisi ke 2 sehubungan dengan Perubahan alokasi pagu anggaran Direktorat Kearsipan Pusat akibat pergeseran anggaran untuk kegiatan Memori Kolektif Bangsa berdasarkan DIPA Revisi XX dan POK Revisi XXIII;

Tabel. 2.6

Perjanjian Kinerja Revisi ke- 3 Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp):

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

18.313.979.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyelamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyelamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga

Jakarta, 12 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Desi Pratiwi



M. Inam Mulyantono

Perjanjian Kinerja tahun 2023 dilakukan revisi ke 3 sehubungan dengan Perubahan alokasi pagu anggaran Direktorat Kearsipan Pusat akibat pergeseran anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja berdasarkan DIPA Revisi XX dan POK Revisi XXV;

Perjanjian Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat Tahun 2023 beberapa kali mengalami perubahan, kemudian dilakukan revisi pada Perjanjian Kinerja Direktur Kearsipan Pusat, Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi pada Perjanjian Kinerja Direktur Kearsipan Pusat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perubahan alokasi pagu anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia akibat kebijakan nasional automatic adjustment APBN;
2. Perubahan alokasi pagu anggaran Direktorat Kearsipan Pusat akibat pergeseran anggaran untuk kegiatan Memori Kolektif Bangsa;
3. Perubahan alokasi pagu anggaran Direktorat Kearsipan Pusat akibat pergeseran anggaran untuk penambahan gaji dan tunjangan kinerja dari sisa pengadaan jasa penataan dan digitisasi arsip kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN;

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan rencana pelaksanaan perjanjian kinerja tiap program/kegiatan/keluaran pada tiap triwulan disertai dengan sasaran dan tolok ukurnya disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang

disusun sebelumnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 2.4

Rencana Aksi Direktorat Kearsipan Pusat Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET			
					I	II	III	IV
1	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional							
A	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02				13,02 Indeks
			- Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15 Lembaga (Rp. 151.140.000)	Identifikasi instansi pemerintah yang akan menerima pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	Rakor Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	Evaluasi Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset
			- Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	31 Lembaga (Rp. 169.539.000)	Rapat Hybrid Fasilitasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan kepada 31 Instansi	Pendampingan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			- Instansi Pusat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakal Berbasis Elektronik (SRIKANDI)	53 Lembaga (Rp. 1.000.000.000)	Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI secara daring	Pelatihan Tenaga Pembimbing Penerapan Aplikasi, Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI
			- Instansi Pusat yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan pemindahan IKN	70 Lembaga (Rp. 15.630.000.000)	Koordinasi Penataan Arsip K/L yang pindah ke IKN, Pengumpulan Data untuk Pelaksanaan Penataan dan Digitasi Arsip K/L	Bimbingan Teknis Pendampingan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN (Penataan Arsip dan Entry Data ke SRIKANDI, Digitasi Arsip secara Terselektif)	Pemantauan dan Evaluasi
B	Koordinasi	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	- Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	4 Kegiatan (1.700.000.000)	Koordinasi Nasional Percepatan Penerapan SRIKANDI	Koordinasi Penguatan Tata Kelola Percepatan Penerapan SRIKANDI	Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Aplikasi SRIKANDI
						Koordinasi Layanan Aplikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	Koordinasi Pengembangan SDM Percepatan Penerapan SRIKANDI	

2.5. Rencana Penarikan Dana

Rencana Penarikan Dana Direktorat Kearsipan Pusat sesuai dengan halaman III DIPA sebagaimana berikut:

Tabel 2.5

Rencana Penarikan Dana dalam DIPA halaman III Tahun 2023

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 087.01.1.450448/2023

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4053-4249-8709-0223

Kementerian Negara/Lembaga : (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Arsip Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (450448) ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kearsipan													
	087.01.CN.5357	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.500	4.848	310.308	29.056	1.342.428	72.523	681.551	1.101.211	255.478	274.101	0	4.073.004
		Pengembangan dan Sertifikasi SDM Kearsipan	45.407	240.513	258.870	418.983	420.195	241.783	60.294	40.056	40.656	12.671	12.661	12.661	1.802.751
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	45.407	240.513	258.870	254.258	420.195	241.783	60.294	40.056	40.656	12.671	12.661	12.661	1.638.026
	087.01.CN.5360	53 BELANJA MODAL	0	0	0	164.725	0	0	0	0	0	0	0	0	164.725
		Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	21.718	85.499	124.602	268.707	686.726	2.022.323	208.594	364.819	107.259	132.186	8.257	9.632	4.038.421
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.655	85.499	123.539	266.582	398.288	2.018.160	205.878	361.473	107.259	132.186	8.257	9.632	3.737.408
		53 BELANJA MODAL	1.063	0	1.063	2.125	288.438	4.162	716	3.446	0	0	0	0	301.013
	087.01.CN.6660	Pembinaan Kearsipan Nasional	25.250	465.482	927.774	1.521.841	746.308	1.125.794	3.586.155	3.008.500	3.625.662	3.044.556	5.533.605	111.540	23.722.557
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	25.250	465.482	927.774	1.521.841	746.308	1.125.794	3.586.155	3.008.500	3.625.662	3.044.556	5.533.605	111.540	23.722.557
	087.01.WA.3614	Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	87.353	169.911	216.835	450.975	287.044	443.446	489.306	443.598	443.632	670.907	295.561	1.868	4.000.435
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	87.353	169.911	216.835	450.975	287.044	443.446	489.306	443.598	443.632	670.907	295.561	1.868	4.000.435
	087.01.WA.3615	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, dan Humas	160.689	726.144	663.731	401.477	2.049.464	362.665	340.418	428.385	787.794	480.798	230.393	140.258	6.772.217
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	160.689	726.144	663.731	401.477	2.049.464	362.665	340.418	428.385	787.794	480.798	230.393	140.258	6.772.217
	087.01.WA.3616	Pelayanan Umum	25.089.300	12.078.069	15.722.787	19.080.455	12.716.264	18.846.945	14.529.927	11.355.502	11.357.295	12.137.017	11.409.975	23.076.173	187.379.800
		51 BELANJA PEGAwai	8.047.934	8.562.434	8.902.454	15.289.202	8.047.934	15.289.202	8.047.934	8.047.934	8.047.934	8.562.434	8.047.944	8.047.965	112.941.485

2.6. Metode Pengukuran

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, uraian atau deskripsi dari sasaran program adalah Pembinaan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah difokuskan pada rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang meliputi kebijakan (tata naskah, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif, Pedoman Penyusutan Arsip, dan Pedoman Pengelolaan Arsip Vital), Pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pengelolaan arsip statis dan sumber daya kearsipan (SDM Kearsipan, Organisasi

kearsipan, Prasarana dan Sarana kearsipan dan pendanaan) untuk mewujudkan tertib arsip. Dengan nilai keberhasilan diklasifikasikan atas:

NO	Nilai Indeks	Persentase lembaga yang memiliki nilai B ke atas
1	AA	90%-100%
2	A	80%-89,99%
3	BB	70%-79,99%
4	B	60%-69,99%
5	CC	50%-59,99%
6	C	30%-49,99%
7	D	0-29%

Sumber Data: Laporan hasil pengawasan hasil kearsipan yang telah ditetapkan Kepala ANRI. Cara Menghitung: Indeks kapabilitas penyelenggara kearsipan pada sasaran program diperoleh dengan membandingkan jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah yang memiliki nilai rata-rata B ke atas dalam LHPK dengan keseluruhan jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah dan dikonversi menjadi indeks dalam skala tertinggi AA.

Indeks peningkatan kapabilitas penyelenggaraan unit kearsipan/lembaga kearsipan instansi pusat tahun 2023, perhitungan hanya dilakukan terhadap instansi yang menerima pendampingan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan (TLHP) tahun 2023. Sesuai dengan target rencana strategis ANRI pada tahun 2023 sebesar 13,02.

Rumus= Jumlah akumulasi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti hingga tahun berjalan sejak tahun 2020 dibagi jumlah akumulasi rekomendasi tahun sebelumnya sejak tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti dikalikan 100.

Contoh perhitungan berikut sesuai target pada Renstra ANRI 2020-2024 dengan baku target 25 rekomendasi yang ditindaklanjuti per tahun.

Angka dasar penghitungan menggunakan jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2019 sebanyak 843.

Sehingga pada tahun 2023 target diperhitungkan sebagai berikut:

$$(25+75):(843-75) \times 100$$

$$= 100:768 \times 100 = 13,02$$

Akumulasi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sejak tahun 2020 sebanyak 100 (25+75) dan akumulasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sejak tahun 2020 sebanyak 768 (843-100).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Renstra

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 telah mengamanatkan bahwa Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kearsipan Pusat Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Strategis Direktorat Kearsipan Pusat

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN ANTARASASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	LOKASI	TARGET KELUARAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran Program :	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan kearsipan													
	-Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan						B							
Output Program:	Kapabilitas Organisasi Kearsipan													
	Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		75 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi							
Kegiatan 2 : Pembinaan kearsipan lingkup pusat								1.950,0	2.305,8	1.786,5	1.670,0	150,0		Direktorat Kearsipan Pusat
	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Pusat													
	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat		2,97	6,11	9,46	13,02	16,82							
	Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi di Pemerintah Pusat		36 Instansi	36 Instansi	40 Instansi	44 Instansi	41 Instansi	1.362,5	1.499,5	1.636,5	1.520,0			
	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset		10 Instansi	15 Instansi				437,5	656,3					
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti		25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		

Direktorat Kearsipan Pusat telah mencapai target kinerja dengan pencapaian Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat sebesar 13,02. Indeks tersebut dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh 31 instansi pusat. Ketiga puluh satu instansi tersebut merupakan instansi yang telah memperoleh pendampingan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2023.

Indeks tahun 2023 dihitung dengan menggunakan rumus = jumlah akumulasi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti hingga tahun 2023 sejak tahun 2020 dibagi jumlah akumulasi rekomendasi tahun sebelumnya sejak tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti dikalikan 100.

Hasil penghitungan = $(313+75):(843-75) \times 100 = 388:768 \times 100 = 50,52$.

Dengan besaran indeks 50,52 tersebut, dianggap bahwa target 13,02 untuk tahun 2023 telah tercapai.

Tabel 3.2
Jumlah Rekomendasi
Pengawasan Kearsipan Instansi Pusat Tahun 2022
Yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023

NO	INSTANSI YANG DIBERIKAN PENDAMPINGAN TLHP 2023	JUMLAH REKOMEN- DASI 2022	JUMLAH REKOMEN- DASI 2023	JUMLAH REKOMEN-DASI YANG TELAH DITINDAK- LANJUTI
1	Mahkamah Agung	66	54	12
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	58	39	19
3	Kementerian Agama	62	49	13
4	Kementerian Sosial	43	29	14
5	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	44	33	11
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	49	39	10
7	Sekretariat Kabinet	53	37	16
8	Kejaksaan Republik Indonesia	48	19	29
9	Tentara Nasional Indonesia	53	43	10
10	Kepolisian Republik Indonesia	60	48	12
11	Dewan Ketahanan Nasional	59	36	23
12	Badan Intelijen Negara	56	39	17
13	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	44	38	6
14	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	50	43	7
15	Badan Narkotika Nasional	46	43	3

NO	INSTANSI YANG DIBERIKAN PENDAMPINGAN TLHP 2023	JUMLAH REKOMEN- DASI 2022	JUMLAH REKOMEN- DASI 2023	JUMLAH REKOMEN-DASI YANG TELAH DITINDAK- LANJUTI
16	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	46	35	11
17	Badan Siber dan Sandi Negara	37	35	2
18	Badan Amil Zakat Nasional	42	32	10
19	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	68	-	
20	Komisi Informasi Pusat	69	60	9
21	Komisi Penyiaran Indonesia	62	-	
22	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	56	48	8
23	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	46	38	8
24	Komisi Pemilihan Umum	43	35	8
25	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	52	32	20
26	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	64	47	17
27	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa	35	17	18
28	Universitas Jember	85	-	
29	Universitas Negeri Semarang	64	-	
30	Universitas Pendidikan Indonesia	65	-	
31	Politeknik Negeri Malang	85	-	
JUMLAH				313

- = Tidak dilakukan pengawasan kearsipan pada tahun 2023 sehingga tidak dimasukkan dalam penghitungan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

3.2. Capaian Indikator Kinerja

Direktorat Kearsipan Pusat juga telah melaksanakan program kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya berdasarkan APBN/DIPA ANRI Tahun 2023. Secara keseluruhan pagu anggaran Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.18.313.979.000,-** (delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

dari semula **Rp.18.650.679.000,-**(delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi anggaran sebesar **Rp.18.081.563.883,-** (delapan belas milyar delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), atau penyerapan anggaran sebesar **98,73 %**.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Capain Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Indeks Peningkatan Kapabilitas UK/LK Pusat	
			Target	Realisasi
2022	Rp.1.367.355.000,-	Rp.1.338.210.984,- (97,87 %)	9,46	9,46 (100 %)
2023	Rp.18.313.979.000,-	Rp.18.081.563.883,- (98,73 %)	13,02	13,02 (100 %)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 meskipun anggaran tahun 2023 lebih besar, dan target indeks peningkatan kapabilitas UK/KL Pusat sama-sama tercapai.

Pelaksanaan program kerja dan anggaran Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun anggaran 2023, secara detail sebagai berikut:

A. Instansi Pemerintah yang menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset

Target realisasi fisik untuk kegiatan Instansi Pemerintah yang menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset pada tahun 2023 adalah **15 instansi** dan telah dilaksanakan sesuai target atau realisasi fisik sebesar **100%**. Instansi yang mendapat pendampingan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Badan Siber dan Sandi Negara
6. Badan Pusat Statistik
7. Badan Kepegawaian Negara
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9. Badan Riset dan Inovasi Nasional
10. Badan Pangan Nasional
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
12. Universitas Pendidikan Indonesia
13. Universitas Jember
14. Universitas Negeri Semarang
15. Politeknik Negeri Malang

Direktorat **Kearsipan** Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset dengan anggaran rupiah murni sebesar **Rp.151.140.000** (seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) **dengan *automatic adjustment*** sebesar **Rp. 24.850.000** (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga anggaran menjadi Rp. **126.290.000** (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan DIPA Revisi XX dan POK Revisi XXIII terdapat pergeseran anggaran untuk Memori Kolektif Bangsa sebesar **Rp. 13.500.000** (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pagu revisi menjadi **Rp. 112.790.000** (seratus dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rencana Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat TA 2023
Keluaran (*Output*) Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	ANGGARAN
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		
6660.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
6660.BDB.001	Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15 Lembaga	112.790.000
6660.BDB.001.051	Identifikasi instansi pemerintah yang akan menerima pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan aset nasional		22.400.000
6660.BDB.001.052	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat		84.790.000
6660.BDB.001.053	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset		5.600.000

Realisasi anggaran tahun anggaran 2023, pada RO Lembaga Pemerintah yang menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset sebesar **Rp.87.943.000** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar **77,97 %** dari total anggaran **Rp. 112.790.000** (seratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sisa anggaran 24.847.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Sisa anggaran yang tidak terserap antara lain untuk belanja bahan konsumsi rapat, sisa belanja pengadaan seminar kit dan belanja jasa profesi.

Perbandingan capaian pada RO Lembaga Pemerintah yang menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
output Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga
dan Arsip Aset Tahun 2022 dan 2023

Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi Target
Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	2022	Rp.173.270.000,-	Rp.166.496.150,- (96,09 %)	15 instansi	15 instansi (100 %)
	2023	Rp. 112.790.000	Rp.87.943.000 (77,97 %)	15 instansi	15 instansi (100 %)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2023, dimana pada tahun 2022 dapat diketahui pembiayaan adalah Rp. 11.099.743/ instansi dan pada tahun 2023 dapat diketahui pembiayaan adalah Rp. 5.862.866/ instansi.

B. Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan, dengan realisasi fisik sebagai berikut:

1. Rapat persiapan workshop tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan dengan mengundang unit kerja terkait di lingkungan ANRI yang dilaksanakan selama Januari-Maret 2023;
2. Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan di laksanakan di Hotel GrandKemang Jakarta pada tanggal 23 Februari 2023 dengan mengundang 31 instansi pusat yang memperoleh nilai rekomendasi Baik dan Cukup.
3. Pendampingan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan dilaksanakan sepanjang tahun 2023, dalam bentuk fasilitasi baik tatap muka maupun daring.

Target lembaga pemerintah yang dibina untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan pada tahun anggaran 2022 adalah sebanyak 31 Kementerian/Lembaga. Realisasi fisik kegiatan dapat dicapai **100**, Kementerian/Lembaga yang dibina adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Sosial
5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Sekretariat Kabinet
8. Kejaksaan Republik Indonesia
9. Tentara Nasional Indonesia
10. Kepolisian Republik Indonesia
11. Dewan Ketahanan Nasional
12. Badan Intelijen Negara
13. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
14. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
15. Badan Narkotika Nasional
16. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
17. Badan Siber dan Sandi Negara
18. Badan Amil Zakat Nasional
19. Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
20. Komisi Informasi Pusat
21. Komisi Penyiaran Indonesia
22. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
23. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
24. Komisi Pemilihan Umum

25. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
26. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
28. Universitas Jember
29. Universitas Negeri Semarang
30. Universitas Pendidikan Indonesia
31. Politeknik Negeri Malang

Hasil dari pembinaan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2022 dan tahun 2023

NO	INSTANSI	2022		2023	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	Mahkamah Agung	32,71	C	44,21	C
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	58,25	CC	67,87	B
3	Kementerian Agama	51,27	CC	49,74	C
4	Kementerian Sosial	75,1	BB	84,94	AA
5	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	61,29	B	72,24	BB
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	58,68	CC	66,19	B
7	Sekretariat Kabinet	64,82	B	71,99	BB
8	Kejaksaan Republik Indonesia	59,92	CC	90,64	AA
9	Tentara Nasional Indonesia	63,64	B	69,4	B
10	Kepolisian Republik Indonesia	45,08	C	48,6	C
11	Dewan Ketahanan Nasional	58,9	CC	69,26	B
12	Badan Intelijen Negara	67,28	B	58,98	CC
13	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	66,78	B	75,56	BB
14	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	60,71	B	66,58	B
15	Badan Narkotika Nasional	64,89	B	64,09	B

16	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	65,63	B	70,35	BB
17	Badan Siber dan Sandi Negara	73,31	BB	72,72	BB
18	Badan Amil Zakat Nasional	66,25	B	78,1	BB
19	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	39,43	C	-	-
20	Komisi Informasi Pusat	29,72	D	18,77	D
21	Komisi Penyiaran Indonesia	37,85	C	-	-
22	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	54,35	CC	51,61	CC
23	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	72,39	BB	76,14	BB
24	Komisi Pemilihan Umum	67,43	B	73	BB
25	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	51,84	CC	72,49	BB
26	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	46,79	C	55,57	CC
27	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	72,24	BB	90,64	AA
28	Universitas Jember	50,38	CC	-	-
29	Universitas Negeri Semarang	64,19	B	-	-
30	Universitas Pendidikan Indonesia	70,56	BB	-	-
31	Politeknik Negeri Malang	35,95	C	-	-

Catatan:

- = Tidak dilakukan pengawasan kearsipan pada tahun 2023.

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan dengan anggaran rupiah murni sebesar **Rp. 169.539.000,-** (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Selanjutnya berdasarkan DIPA Revisi XX dan POK Revisi XXIII terdapat pergeseran anggaran untuk Memori Kolektif Bangsa sebesar **Rp. 18.600.000,-** (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga pagu revisi

menjadi **Rp. 150.939.000** (seratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

Rencana Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat TA 2023
Keluaran (*Output*) Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	ANGGARAN
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		
6660.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
6660.BDB.002	Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	31 Lembaga	150.939.000
6660.BDB.002.051	Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan		145.339.000
6660.BDB.002.052	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		5.600.000

Realisasi anggaran tahun anggaran 2023, pada kegiatan Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan sebesar **Rp.138.594.164,-** (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar **91,85 %** dari total anggaran **Rp. 150.939.000** (seratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisa anggaran Rp. 12.344.836,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Sisa anggaran yang tidak terserap antara lain untuk belanja bahan konsumsi rapat, sisa belanja pengadaan seminar kit dan belanja jasa profesi.

Perbandingan capaian pada RO Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel3.6
Perbandingan Capaian Kinerja
output Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Tahun 2022 dan 2023

Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi Target
Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan	2022	Rp.175.000.000,-	Rp.166.496.150,- (95,14 %)	32 instansi	32 instansi (100 %)
	2023	Rp. 150.939.000,-	Rp.138.594.164,- (91,82 %)	31 instansi	31 instansi (100 %)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2023, dimana pada tahun 2022 dapat diketahui pembiayaan adalah Rp. 5.203.004/ instansi, dan pada tahun 2023 dapat diketahui pembiayaan adalah Rp. 4.470.779/ instansi.

C. Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI, dengan realisasi fisik sebagai berikut:

- a. Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI. Telah dilaksanakan koordinasi internal ANRI untuk kegiatan koordinasi percepatan penerapan SRIKANDI, pada kegiatan ini telah dilakukan pemetaan untuk kegiatan koordinasi percepatan penerapan SRIKANDI, antara lain: Koordinasi Penguatan Tata Kelola Percepatan Penerapan SRIKANDI, Koordinasi Layanan Aplikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI, Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Percepatan

Penerapan SRIKANDI. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pengembangan SDM dalam rangka percepatan penerapan aplikasi SRIKANDI. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI.

Tabel 3.7

Kegiatan Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Ket
A. Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI				
1	Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penerapan SRIKANDI: - Tahap 1 - Tahap 2	Tahap I: Rabu – Jumat, 1 – 3 Maret 2023 Tahap II: Kamis – Sabtu, 11 – 13 Mei 2023	Tahap I: Hotel RA Suite Simatupang, Jakarta Tahap II: Hotel RA Suite Simatupang, Jakarta	
B. Koordinasi Penguatan Tata Kelola Percepatan Penerapan SRIKANDI				
1	Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Percepatan Penerapan SRIKANDI	29 November – 1 Desember 2023	Hotel Gran Melia Jakarta	
C. Koordinator Layanan Aplikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI				
1	Rapat Koordinasi Layanan Aplikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	26 – 28 Juni 2023	Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta	
D. Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI				
1	Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	29 November – 1 Desember 2023	Hotel Gran Melia Jakarta	
E. Koordinasi Pengembangan SDM Percepatan Penerapan SRIKANDI				
1	Rapat koordinasi pengembangan SDM percepatan penerapan SRIKANDI - Tahap 1 - Tahap 2	7 – 9 Desember 2023	Hotel Whyndam Casablanca, Jakarta	
F. Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Aplikasi SRIKANDI				

- b. Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI yang merupakan Rincian Output Baru yang menjadi Prioritas Nasional dengan anggaran rupiah murni sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rencana Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat TA 2023
Keluaran (*Output*) Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	ANGGARAN
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		
6660.PEA	Koordinasi		
6660.PEA.001	Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	4 Kegiatan	1.700.000.000
6660.PEA.001.051	Persiapan		346.650.000
6660.PEA.001.052	Pelaksanaan		1.250.875.000
6660.PEA.001.053	Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Aplikasi SRIKANDI		102.475.000

Realisasi anggaran tahun anggaran 2023, pada kegiatan Kordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI sebesar **Rp.1.646.394.311,-** (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah) atau sebesar **96,85 %** dari total anggaran **Rp. 1.700.000.000** (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sisa anggaran 53.605.689,- (lima puluh tiga juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Sisa anggaran yang tidak terserap antara lain belanja bahan untuk konsumsi, belanja perjalanan paket meeting dalam kota untuk transportasi dan belanja jasa profesi.

Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI telah menghasilkan 4 paket rekomendasi yang meliputi bidang Tata Kelola, Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Sumber Daya Manusia.

Kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan kinerja pada tahun 2022 mengingat kegiatan baru ada pada tahun 2023.

D. Instansi Pemerintah yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI)

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Instansi Pemerintah yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) bagi Instansi Pusat, dengan realisasi fisik sebagai berikut:

- a. Rapat Persiapan Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI yang dilaksanakan selama bulan Januari-Maret 2023, dengan mengundang unit kerja terkait di lingkungan ANRI;
- b. Pelatihan Pembimbing Aplikasi SRIKANDI yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Gandaria City pada tanggal 8-10 Maret 2023.

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Instansi Pusat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) yang masih menjadi Prioritas Nasional. Lembaga yang telah mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI ada 53 lembaga, antara lain:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2. Badan Siber dan Sandi Negara
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

4. Kementerian Hukum dan HAM
5. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
6. Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK-RI)
7. Sekretariat Negara RI
8. Sekretariat Kabinet RI
9. Kementerian Keuangan RI
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Lembaga Sensor Film
12. Kementerian Sosial
13. Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Investasi
16. Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
17. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
18. Kejaksaan RI
19. Badan inteligen Negara (BIN)
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia
21. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
22. Otorita Ibu kota Nusantara (IKN)
23. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
24. Mahkamah Agung
25. Mahkamah konstitusi
26. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

27. Badan Nasional Sertifikat Profesi
28. Badan Pengatur Jalan Tol
29. Dewan Pers
30. Komisi Kepolisian Nasional
31. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
32. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
33. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
34. Dewan Energi Nasional
35. Dewan Pertimbangan Presiden
36. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
37. Komisi Kejaksaan
38. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
39. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
40. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
41. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
42. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
43. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
44. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
45. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
46. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

47. Kantor Staf Presiden
48. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
49. Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
50. Komisi Aparatur Sipil Negara
51. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
52. Dewan Pengupahan Nasional
53. Komite Pengawas Perpajakan

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan aplikasi SRIKANDI secara luring dengan mengundang seluruh instansi yang telah mengikuti bimbingan teknis penerapan aplikasi SRIKANDI sebelumnya.

Hasil dari pendampingan penerapan SRIKANDI pada 53 instansi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.3.9
Data Naskah Masuk dan Keluar Implementasi SRIKANDI tahun 2023

NO	INSTANSI	NASKAH MASUK	NASKAH KELUAR	DISPOSISI
1	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	22.690	23.404	11.886
2	Badan Siber dan Sandi Negara	97	96	86
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	81	79	0
4	Kementerian Hukum dan HAM	1.762	1.444	994
5	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	93.689	85.492	47.855
6	Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK-RI)	82	94	1
7	Sekretariat Negara RI	325	367	3
8	Sekretariat Kabinet RI	103	114	0

9	Kementerian Keuangan RI	301	318	0
10	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	3	4	0
11	Lembaga Sensor Film	10	6	6
12	Kementerian Sosial	386	440	63
13	Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi	375	270	0
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	202	208	3
15	Kementerian Investasi	87	99	8
16	Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	702	759	183
17	Badan Pangan Nasional (Bapanas)	124	133	1
18	Kejaksaan RI	2	2	0
19	Badan Inteligen Negara (BIN)	40	42	4
20	Kepolisian Negara Republik Indonesia	450	503	62
21	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	2	2	0
22	Otorita Ibu kota Nusantara (IKN)	55	54	0
23	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	274	316	0
24	Mahkamah Agung	136	151	17
25	Mahkamah konstitusi	61	77	43
26	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	197	204	9
27	Badan Nasional Sertifikat Profesi	14	15	0
28	Badan Pengatur Jalan Tol	3	3	0
29	Dewan Pers	10	10	0
30	Komisi Kepolisian Nasional	450	503	62
31	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	139	252	14
32	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	334	388	73
33	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	7	7	0
34	Dewan Energi Nasional	15	16	0
35	Dewan Pertimbangan Presiden	14	16	0
36	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	3	4	0

37	Komisi Kejaksaan	17	15	0
38	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	7	7	0
39	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	1.079	4.870	1.113
40	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	20	18	0
41	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	13	15	0
42	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	12	11	0
43	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2	2	0
44	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	23	23	0
45	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	3	3	0
46	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	81	79	0
47	Kantor Staf Presiden	85	89	0
48	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	19	25	8
49	Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	5	5	0
50	Komisi Aparatur Sipil Negara	83	92	0
51	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	67	67	0
52	Dewan Pengupahan Nasional	3	3	0
53	Komite Pengawas Perpajakan	3	3	0

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Instansi Pusat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) yang masih menjadi Prioritas Nasional dengan anggaran rupiah murni sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

Tabel 3.10
Rencana Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat TA 2023
Keluaran (*Output*) Instansi Pusat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI)

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	ANGGARAN
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		
6660.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	53 Lembaga	
6660.QDB.001	Instansi pusat yang menerapkan aplikasi kearsipan berbagi pakai berbasis elektronik (SRIKANDI)	53 Lembaga	1.000.000.000
6660.QDB.001.051	Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI		108.420.000
6660.QDB.001.052	Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI		147.385.000
6660.QDB.001.053	Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI		575.964.000
6660.QDB.001.054	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi		168.231.000

Realisasi anggaran tahun anggaran 2023, pada kegiatan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) bagi Instansi Pusat, sebesar **Rp. 967.961.504;** (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) atau sebesar **96,80 %** dari total anggaran **Rp. 1.000.000.000** (satu milyar rupiah) dan sisa anggaran 32.038.496,- (tiga puluh dua juta tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut adalah belanja bahan sisa pengadaan seminar kit, konsumsi rapat, belanja jasa profesi dan efisiensi perjalanan dinas ke Banyuwangi dalam rangka monitong dan evaluasi penerapan aplikasi SRIKANDI di instansi pusat vertikal di daerah.

Tabel 3.11

Penerapan Aplikasi SRIKANDI oleh instansi pusat Tahun 2020-2023

Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi Target
Penerapan Aplikasi SRIKANDI	2022	Rp.1.050.000.000,-	Rp.1.019.085.000,- (97,89 %)	53 instansi	53 instansi (100 %)
	2023	Rp.1.000.000.000,-	Rp.967.961.504,- (96,80 %)	53 instansi	53 instansi (100 %)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2023, dimana pada tahun 2022 dapat diketahui pembiayaan adalah Rp. 19.228.018/ instansi, dan pada tahun 2023 dapat diketahui pembiayaan adalah Rp. 18.263.424/ instansi. Selain itu pencapaian target pada tahun 2023 lebih cepat yaitu pada bulan Juli 2023, sedangkan pada tahun 2022 baru tercapai pada bulan Desember 2022.

E. Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN, dengan realisasi fisik sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi fisik Instansi Pemerintah yang menerima pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Keterangan
1	Koordinasi		Dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting		70 instansi
2	Rapat Koordinasi	7 Februari 2023	Hotel GrandKemang	70 instansi	
3	Bimtek Pendamping Penataan Arsip	Tahap 1 Kementerian 14-15 Juni 2023 dan Tahap II Lembaga 16-17 Juni 2023	Tahap 1 RA Suite Simatupang Tahap 2 di GrandKemang Hotel	Tahap 1 35 instansi Tahap 2 sebanyak 35 instansi	70 instansi

4	Jasa penataan arsip dengan total volume 35.000 ml	3 Juli – 30 November 2023, addendum 3 juli-15 Desember 2023	Di masing-masing Kementerian/Lembaga	63 instansi	Target 70 instansi, disebutkan
5	Jasa alih media arsip, dengan volume 1.750.000 lembar	10 Oktober – 14 Desember 2023	Di masing-masing Kementerian/Lembaga	63 instansi	Target 70 instansi tercapai 63 instansi

Mengingat belum adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSKP) yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan penataan dan alih media arsip, maka Direktorat Kearsipan Pusat berinisiatif untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan penataan dan digitisasi arsip.

SOP Makro 1. SOP Persiapan Penataan Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke Ibu Kota Negara

18 SOP Mikro sebagai berikut:

1. SOP Kick Off Meeting dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip
2. SOP Tinjauan Lapangan/Survei Arsip
3. SOP Bimbingan Teknis Kepada Pendamping Kementerian/Lembaga
4. SOP Pembekalan Kepada Pelaksana Penata Arsip Perusahaan Jasa Penataan Arsip
5. SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Penataan Arsip
6. SOP Pemindahan Arsip Yang Akan Ditata Ke Ruang Penataan Arsip
7. SOP Pemilahan Arsip dan Pengelompokkan Arsip
8. SOP Penyusunan Skema Pengaturan Arsip
9. SOP Penginputan Deskripsi Arsip
10. SOP Manuver Data dan Fisik Arsip
11. SOP Penyimpanan Arsip di Ruang Penyimpanan Arsip
12. SOP Penyeleksian dan Penyusunan Daftar Arsip
13. SOP Input Daftar Arsip Hasil Penataan Arsip Ke Aplikasi Srikandi
14. SOP Verifikasi Hasil Penataan Arsip dan Uji Coba Penemuan Kembali

15. SOP Pemantauan Kegiatan Penataan Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN
16. SOP Alih Pengetahuan Kepada Arsip Nasional RI dan Kementerian/Lembaga dan Penyusunan Laporan Akhir Hasil Penataan Arsip
17. SOP Serah Terima Pekerjaan

Sedangkan SOP Pelaksanaan Digitisasi Arsip terdiri dari 1 SOP Makro dan 11 SOP Mikro, sebagai berikut:

SOP Makro: Digitisasi Arsip terselektif pada arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke Ibu Kota Negara

SOP Mikro sebagai berikut:

1. SOP Persiapan Digitisasi arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke Ibu Kota Negara secara terselektif
2. SOP Bimbingan Teknis kepada pendamping Kementerian/Lembaga
3. SOP Kick of Meeting dengan Perusahaan Jasa Digitisasi Arsip
4. SOP Tinjauan Lapangan/Survei Arsip
5. SOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Digitisasi Arsip
6. SOP Digitisasi Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke Ibu Kota Negara
7. SOP Pemantauan Kegiatan Digitisasi Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke Ibu Kota Negara
8. SOP Penghapusan Data dan Fail Hasil Digitisasi secara total dari perangkat yang dipergunakan;
9. SOP Alih Pengetahuan kepada ANRI dan Kementerian/Lembaga dan Penyusunan Laporan Akhir Hasil Digitisasi Arsip
10. SOP Serah Terima Hasil Pekerjaan Digitisasi Arsip
11. SOP Input Arsip Hasil Digitisasi pada Aplikasi SRIKANDI

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Rapat persiapan koordinasi penataan arsip K/L yang pindah ke IKN yang dilaksanakan selama bulan Januari-Maret 2023, dengan mengundang unit kerja terkait di lingkungan ANRI;
2. Rapat persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Penataan Arsip K/L yang pindah ke IKN dengan mengundang unit kerja terkait di lingkungan ANRI, seperti Pusat Jasa Kearsipan, Inspektorat, Biro Umum, dan Biro Perencanaan dan Humas;
3. Rapat Koordinasi Penataan Arsip K/L yang pindah ke IKN dan Pengumpulan Data untuk pelaksanaan Penataan dan Digitasi Arsip K/L yang dilaksanakan di Hotel GrandKemang Jakarta pada tanggal 7 Februari 2023 dengan mengundang perwakilan dari 70 Instansi yang akan pindah ke IKN.
4. Telah ditunjuk 4 perusahaan jasa kearsipan yang terakreditasi untuk dapat melaksanakan penataan arsip sejumlah 63 Kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN dengan total volume arsip 35.000 ml. Waktu Pekerjaan penataan arsip Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke IKN tanggal 3 Juli-15 Desember 2023.
5. Ruang lingkup Penataan Arsip pada Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Negara sebagai berikut :
 - a. Persiapan Penataan Arsip, yaitu:
 - (1) Penyusunan NSPK dan SOP Penataan Arsip .
 - (2) (Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan perusahaan jasa penataan arsip.
 - (3) Pengadaan barang/jasa kearsipan.
 - (4) Pelatihan pendamping penataan arsip
 - (5) Penyiapan ruang kerja penataan arsip dan ruang simpan arsip yang telah ditata oleh Kementerian/Lembaga.
 - (6) Tinjauan lapangan di Kementerian/Lembaga.
 - (7) *Kick off Meeting*.

- (8) Pembekalan bagi SDM Pelaksana Penata Arsip.
- b. Pelaksanaan Penataan Arsip, yaitu :
- (1) Arsip tertata fisik dan informasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan kearsipan.
 - (2) Daftar arsip keseluruhan.
 - (3) Daftar arsip yang masih disimpan Kementerian/Lembaga.
 - (4) Daftar arsip terjaga dan/atau arsip aset dan/atau daftar arsip usul serah.
 - (5) Daftar arsip usul musnah.
 - (6) Laporan jumlah arsip yang ditata dan jumlah non arsip hasil pemilahan.

Penataan arsip telah dilaksanakan sejumlah 63 kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN, antara lain:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3. Badan Pusat Statistik
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Komisi Yudisial
8. Mahkamah Agung
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Badan Keamanan Laut
11. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
12. Badan Narkotika Nasional
13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
15. Dewan Ketahanan Nasional

16. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
19. Kementerian Pemuda dan Olahraga
20. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
23. Badan Pengawas Obat dan Makanan
24. Kejaksaan Agung
25. Kementerian Ketenagakerjaan
26. Kementerian Keuangan
27. Kementerian Perdagangan
28. Kementerian Sosial
29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30. Tentara Nasional Indonesia
31. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
32. Lembaga Ketahanan Nasional
33. Kementerian Perindustrian
34. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
35. Kementerian Agama
36. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
37. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
38. Badan Informasi Geospasial
39. Badan Siber dan Sandi Negara
40. Badan Intelijen Negara
41. Badan Kepegawaian Negara
42. Badan Pangan Nasional
43. Badan Riset dan Inovasi Nasional

44. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
45. Dewan Pertimbangan Presiden
46. Dewan Perwakilan Daerah
47. Dewan Perwakilan Rakyat
48. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
49. Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Kementerian Kesehatan
51. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
52. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
53. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
56. Kementerian Pertahanan
57. Kepolisian Negara Republik Indonesia
58. Lembaga Administrasi Negara
59. Majelis Permusyawaratan Rakyat
60. Kementerian Pertanian
61. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
62. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
63. Kementerian Perhubungan

Terdapat 7 Kementerian/Lembaga yang tidak bersedia dilakukan penataan arsipnya dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi arsip telah tertata dan telah ada daftar arsip;
2. Badan Pemeriksa Keuangan dengan alasan kerahasiaan arsip;
3. Kementerian Sekretariat Negara dengan alasan kerahasiaan arsip;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah memiliki anggaran untuk penataan arsip seluruh unit kerja pada tahun 2023;
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan alasan kerahasiaan arsip;

6. Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan kerahasiaan arsip;
7. Pasukan Pengaman Presiden dengan alasan kerahasiaan arsip;

Persiapan pelaksanaan Digitisasi arsip kertas Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke IKN:

1. Koordinasi digitisasi/alih media arsip kertas Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke IKN
2. Pengumpulan data untuk pelaksanaan digitisasi/alih media arsip kertas yang akan pindah ke IKN
3. Bimbingan teknis pendampingan digitisasi/alih media arsip kertas yang akan pindah ke IKN

Pelaksanaan Digitisasi/Alih Media Arsip Kertas K/L yang akan Pindah ke IKN:

1. digitisasi/alih media arsip kertas K/L sebanyak 1.750.000 lembar akan dilaksanakan oleh perusahaan jasa digitisasi/alih media arsip kertas melalui proses pengadaan barang/jasa oleh ANRI. Digitisasi/alih media arsip kertas dilakukan terhadap kelompok arsip yang telah tertata yang diusulkan oleh K/L dan dilakukan di wilayah Jabodetabek.
2. K/L diharapkan menyediakan tenaga pendamping, tenaga pendukung, ruang kerja, dan peralatan pendukung.
3. Output digitisasi/alih media arsip kertas terdiri atas:
 - Berita acara digitisasi/alih media arsip kertas
 - Daftar hasil digitisasi/alih media arsip kertas
 - File hasil digitisasi/alih media arsip kertas

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan ANRI bersama Kementerian/Lembaga terhadap hasil digitisasi/alih media arsip kertas yang telah dilakukan oleh perusahaan jasa kearsipan.

Telah ditunjuk pihak ketiga untuk dapat melaksanakan Kegiatan Digitisasi Arsip Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke IKN. Kegiatan ini semula di targetkan 70 Kementerian/Lembaga, namun setelah dilaksanakan tinjauan lapangan hanya 63 Kementerian/Lembaga yang bersedia untuk dilakukan Digitisasi Arsip. Waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 10 Oktober sampai dengan 14 Desember 2023 dengan hasil 1.750.000 lembar.

Kementerian/Lembaga yang dilakukan digitisasi arsip, antara lain:

1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Informasi Geospasial
3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
4. Badan Nasional Penanggulangan terorisme
5. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7. Kementerian Agama
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
9. Badan Narkotika Nasional
10. Lembaga Ketahanan Nasional
11. Mahkamah Konstitusi RI
12. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13. Kemenko Perekonomian
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia
16. Kementerian Pertanian

17. Kementerian Perhubungan
18. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
20. Lembaga Administrasi Negara
21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22. Kementerian Perindustrian
23. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
24. Badan Keamanan Laut
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
26. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
27. Kementerian Kelautan dan Perikanan
28. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29. Dewan Ketahanan Nasional
30. Badan Riset dan Inovasi Nasional
31. Kementerian Keuangan
32. Tentara Nasional Indonesia
33. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah
34. Badan Pemeriksa Keuangan
35. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
36. Badan Pengawas Obat dan Makanan
37. Kementerian Sosial

38. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
39. Komisi Pemberantasan Korupsi
40. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
41. Kementerian Ketenagakerjaan
42. Majelis Permusyawaratan Rakyat
43. Kementerian Perdagangan
44. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
45. Dewan Perwakilan Rakyat
46. Dewan Perwakilan Daerah
47. Mahkamah Agung RI
48. Kementerian Dalam Negeri
49. Kementerian Luar Negeri
50. Komisi Yudisial
51. Kejaksaan Agung
52. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
53. Kementerian Pertahanan
54. Badan Siber dan Sandi Negara
55. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
56. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
57. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
58. Kementerian ATR/BPN

59. Badan Pusat Statistik

60. Badan Intelijen Negara

61. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

62. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

63. Badan Pangan Nasional

Terdapat 7 Kementerian/Lembaga yang tidak bersedia dilakukan digitisasi arsip dengan alasan kerahasiaan data, antara lain:

1. Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Kantor Staf Presiden;
3. Kementerian Sekretariat Negara;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Badan Kepegawaian Negara;
7. Pasukan Pengaman Presiden.

Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 telah menetapkan kinerja output Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN yang merupakan Rincian Output Baru dan Prioritas Nasional dengan anggaran rupiah murni sebesar **Rp. 15.630.000.000-** (lima belas milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada DIPA Revisi XX dan POK Revisi XXV terdapat pergeseran anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang diambil dari sisa pengadaan jasa penataan dan digitalisasi arsip sebesar **Rp. 279.750.000** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pagu revisi menjadi **Rp. 15.350.250.000** (lima belas milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Tabel 3.13
Rencana Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat TA 2023
Keluaran (*Output*) Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan
Perpindahan IKN

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	ANGGARAN
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		
6660.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
6660.QDB.002	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN	70 Lembaga	15.350.250.000
6660.QDB.002.051	Persiapan Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN		749.485.000
6660.QDB.002.052	Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN		14.599.450.000
6660.QDB.002.053	Pemantauan dan Evaluasi		1.315.000

Realisasi tahun anggaran 2023, pada RO Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN, sebesar **Rp. 15.240.670.904**; (lima belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) atau sebesar **99,29 %** dari total anggaran **Rp. 15.350.250.000** (lima belas milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa anggaran 109.579.096,- (seratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah). Anggaran yang tidak terserap tersebut antara lain untuk belanja bahan, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota untuk transportasi dan belanja perjalanan dinas dalam kota yang tidak dapat diajukan sepenuhnya.

Kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan kinerja pada tahun 2022 mengingat kegiatan baru ada pada tahun 2023.

F. Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan pada Instansi Pusat

Pada tahun 2022 Direktorat Kearsipan Pusat juga telah melaksanakan kegiatan tanpa anggaran sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Kearsipan Pusat antara lain fasilitasi penyelenggaraan kearsipan pada Instansi Pusat yang meliputi Kementerian/Lembaga, Lembaga Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, serta organisasi kemasyarakatan sebanyak **884 kegiatan kepada 167 instansi pusat, dengan rincian sebagai berikut:**

Tabel 3.14
Layanan Fasilitas, Konsultasi dan Bimbingan
Penyelenggaraan Kearsipan di Instansi Pusat

Jenis Instansi Pusat	Jumlah Layanan (kali)	Jumlah Instansi
Kementerian/Lembaga	772	93 Kementerian/Lembaga
Perguruan Tinggi Negeri	80	44 Perguruan Tinggi
Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan	82	33 Perusahaan
Total	934	170 Instansi Pusat

1. Fasilitas/konsultasi/bimbingan teknis kepada **93 instansi** Kementerian/Lembaga, Lembaga Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural sejumlah **772 kegiatan** dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran.
2. Fasilitas/konsultasi/bimbingan teknis kepada **33 Badan Usaha Milik Negara/Swasta**, sejumlah **82 kegiatan**, sebagaimana tercantum pada lampiran;
3. Fasilitas/konsultasi/bimbingan teknis kepada **44 perguruan tinggi/** organisasi masyarakat sejumlah **80 kegiatan**, sebagaimana tercantum pada lampiran;

Objek dalam kegiatan fasilitasi, konsultasi, dan bimbingan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Instansi Pusat adalah Instansi Pusat yang akan membangun atau menyempurnakan penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Bentuk pemberian fasiltasi, konsultasi, dan bimbingan penyelenggaraan kearsipan adalah diawali dengan merespon menerima kehadiran Instansi Pusat, atau menjawab permintaan konsultasi baik melalui surat yang dikirim melalui Srikandi, telepon, whatsapp, atau e-mail, yang jika diperlukan akan berlanjut dengan memberikan fasilitas berupa beberapa kali rapat baik yang dilaksanakan dalam bentuk klasikal atau dalam jaringan (via zoom).

Kegiatan	Tahun	Jumlah
Layanan Fasilitasi, Konsultasi dan Bimbingan Penyelenggaraan Kearsipan di Instansi Pusat	2022	802 kali (155 instansi)
	2023	934 kali (170 instansi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah layanan dan instansi yang diberikan layanan pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022, serta layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan instansi.

G. Mengkoordinasikan Layanan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Direktorat Kearsipan Pusat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan yang salah satu tugas pokoknya adalah memberikan layanan dalam rangka pemberian persetujuan/pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA instansi oleh Kepala Arsip Nasional RI.

Pada tahun 2023 ini, Direktorat Kearsipan Pusat telah memberikan fasilitasi pemberian persetujuan/pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA) instansi sebanyak **26 JRA** dari target yang direncanakan sebanyak **20 JRA**.

1. Komisi Pemilihan Umum
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3. Kementerian Kesehatan
4. Dewan Perwakilan Daerah
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. Kementerian Keuangan Fungsi Fasilitatif
7. Kementerian Keuangan Fungsi Anggaran
8. Kementerian Keuangan Fungsi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
9. Badan Pangan Nasional
10. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
11. Kementerian Keuangan FungsiPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
12. Kementerian Keuangan Fungsi Penerimaan Negara Bea dan Cukai
13. Kementerian Keuangan FungsiPerimbangan Keuangan
14. Kementerian Keuangan FungsiKajian dan Penelitian
15. Lembaga Penjamin Simpanan
16. PT Sarinah (persero)
17. PT Waskita Beton Precast Tbk
18. PT Waskita Karya (Persero)
19. PT BRI
20. UIN Sulthan Tahah Saifuddin Jambi
21. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
22. Universitas Riau
23. Universitas Pendidikan Ganesha
24. Yakkap I
25. Kementerian Keuangan Fungsi Kekayaan Negara
26. Kementerian Keuangan Fungsi Profesi Keuangan
27. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreaif/Baparekraf

Kegiatan	Tahun	Jumlah
Layanan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	2022	24 JRA
	2023	26 JRA

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah layanan persetujuan/pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022, serta layanan diberikan sesuai dengan SOP.

H. Hambatan dan Pemecahan Masalah

Hambatan dan pemecahan masalah akan disampaikan per masing-masing RO, sebagaimana berikut:

1. Instansi Pemerintah yang menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset

Hambatan:

- Instansi Pusat yang memiliki arsip terjaga, belum menyampaikan daftar arsip terjaga dan menyampaikan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI;
- Instansi Pusat sebenarnya sudah memiliki arsip aset dan mengelola dengan baik, namun belum membuat daftar arsip aset dan kurang memahami dalam pengaman fisik arsip tersebut.

Pemecahan Masalah:

- Perlu dilakukan pendampingan yang efektif agar seluruh instansi pusat dapat menyusun daftar arsip terjaga dan segera menyerahkan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI;
- Perlu dilakukan pendampingan yang efektif agar seluruh instansi pusat dapat membuat daftar aset dan mengatur terkair pengamanan fisik arsip aset tersebut.

2. Lembaga Pemerintah yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan

Hambatan:

- Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan baru diterima Direktorat Kearsipan Pusat pada bulan Mei, sehingga kegiatan pendampingan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan baru dapat dilaksanakan pada triwulan ke II;

Pemecahan Masalah:

- Perlunya diinventarisir jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2022, agar dapat memberikan pendampingan kepada instansi pusat terkait rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

3. Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI

Hambatan:

- Dukungan dari pimpinan tinggi instansi pusat terkait penerapan aplikasi SRIKANDI belum memadai;
- Tidak adanya tenaga Pranata Komputer dan terbatasnya SDM yang memahami TIK pada Direktorat Kearsipan Pusat dalam rangka percepatan penerapan aplikasi SRIKANDI;

Pemecahan Masalah:

- Peningkatan koordinasi/kolaborasi pada tingkat pimpinan tinggi;
- Perlunya koordinasi dan dukungan tenaga pranata komputer dari Pusat Data dan Informasi untuk membantu dalam fasilitasi percepatan implemntasi SRIKANDI bagi Kementerian/Lembaga;

4. Instansi Pemerintah yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI)

Hambatan:

- Keberhasilan penerapan Aplikasi SRIKANDI sangat dipengaruhi oleh kapabilitas Unit Kearsipan Lembaga dalam mengelola penerapan Aplikasi

SRIKANDI masih kurang memadai. Kegamangan Unit Kearsipan (UK) I lembaga dalam melaksanakan peran sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penerapan SRIKANDI di lingkungan lembaganya mengingat aplikasi akan dipakai oleh seluruh pegawai dan unit kerja pada semua jenjang;

- Permasalahan terkait penerapan aplikasi SRIKANDI: sering terjadi ada pemeliharaan sistem yang dilaksanakan oleh BSR E BSSN yang mengakibatkan portal AMS tidak dapat diakses. Untuk layanan tanda tangan elektronik sudah berangsur normal namun terdapat perubahan sementara pada status sertifikat elektronik di sejumlah pengguna;
- Pemeliharaan sistem yang dilaksanakan oleh BSR E yang mengakibatkan portal AMS tidak dapat diakses. Untuk layanan tanda tangan elektronik sudah berangsur normal, namun terdapat perubahan sementara pada status sertifikat di sejumlah pengguna.

Pemecahan Masalah:

- Penguatan kapabilitas dan pemberdayaan Unit Kearsipan Lembaga dalam mengelola penerapan Aplikasi SRIKANDI di lingkungannya;
- Peningkatan/kolaborasi dengan tim SPBE Nasional;
- Pengguna aplikasi SRIKANDI harus sering mencoba TTE secara berkala;

5. Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Perpindahan IKN

Hambatan:

- NSPK Penataan arsip belum memadai untuk sampai pada kebutuhan sebagai dasar kontrak yang terukur.
- Kompetensi teknis penataan arsip dari arsiparis ANRI belum memadai;
- Kompetensi teknis pengelola APBN dalam pengadaan jasa penataan arsip belum memadai karena baru pertama kali;
- Kompetensi teknis penataan arsip dari arsiparis Kementerian/lembaga belum memadai;

- Kompetensi koordinasi/kolaborasi Unit Kearsipan I Kementerian/Lembaga belum memadai
- Kompetensi koordinasi/kolaborasi Unit Kearsipan I Kementerian/Lembaga dengan Unit Kearsipan di bawahnya dan Unit Pengolah belum memadai;
- Kompetensi teknis penataan arsip dan sosio kultural sari tenaga pelaksana penataan arsip dari perusahaan belum memadai;
- Pengorganisasi pelaksanaan penataan arsip kurang optimal;

Pemecahan Masalah:

- Penyusunan dan penetapan SOP penataan arsip sebagai dasar kontrak pelaksanaan pekerjaan jasa penataan arsip;
- Peningkatan diskusi internal tim pendamping penataan arsip Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke IKN;
- Konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan pendampingan dari POKJA Pengadaan serta Inspektorat ANRI;
- Bimbingan Teknis dan pendampingan penataan arsip dari Tim ANRI;
- Tim ANRI terlibat dalam koordinasi/kolaborasi di internal Kementerian/Lembaga;
- Peningkatan diskusi Tim Pendamping ANRI dengan tenaga pelaksana dari perusahaan;
- Peningkatan koordinasi Tim Pendamping ANRI dengan manajemen perusahaan;

6. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan pada Instansi Pusat

Hambatan:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Kearsipan Pusat dalam memenuhi permohonan pembinaan dari seluruh binaan di instansi pusat baik Kementerian/Lembaga, BUMN, PTN, Ormas dan Orpol.

Pemecahan Masalah:

- Melibatkan unit kerja lain sebagai fasilitator dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan kearsipan di instansi pusat;
- Perlu strategi dalam pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada instansi yang tidak tersedia anggarannya, dalam hal ini BUMN/Perusahaan, PTN, Ormas, Orpol, dan Perseorangan, dengan membuat acara misalnya rapat koordinasi secara daring menggunakan *zoom meeting* yang dilakukan secara periodik terhadap seluruh *stakeholder*.

7. Mengkoordinasikan Layanan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip

Hambatan:

- Lemahnya koordinasi dari Unit Kearsipan untuk dapat dilakukan pembahasan awal penyusunan Draft Jadwal Retensi Arsip;
- Kurangnya pemahaman dari instansi terkait penyusunan dan penggunaan Jadwal Retensi Arsip, sehingga draft yang diusulkan masih perlu banyak penyesuaian;
- Adanya format baru yang mengharuskan arsiparis melakukan penyesuaian format, sehingga waktu penyelesaian membutuhkan waktu lebih;

Pemecahan Masalah:

- Perlunya keterlibatan pendampingan dari ANRI untuk menyusun draft jadwal retensi arsip;
- Peningkatan kompetensi dan dari unit kearsipan agar dapat memberikan pemahaman kepada unit pengolah di lingkungannya dalam penyusunan dan penggunaan jadwal retensi arsip;
- Perlu adanya templet yang baku agar penyusunan jadwal retensi arsip dapat seragam dan memudahkan arsiparis.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam Laporan Kinerja Direktorat Kearsipan Pusat Tahun 2023 menampilkan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian strategis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kearsipan Pusat pada Tahun 2023. Pencapaian sasaran strategis Direktorat Kearsipan Pusat tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Kearsipan Pusat Tahun 2023. Pengukuran dan penilaian Direktorat Kearsipan Pusat didasarkan pada target dan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Kearsipan Pusat yang didasarkan pada perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Direktorat Kearsipan Pusat telah mencapai target kinerja dengan capaian Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat sebesar 13,02. Direktorat Kearsipan Pusat pada tahun 2023 secara umum dapat melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perencanaan, namun dalam realisasi kinerja mengalami kendala dan hambatan seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya.

Direktorat Kearsipan Pusat sudah berupaya melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran yaitu **Rp. 18.081.563.883,-** (delapan belas milyar delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar **98,73 %** dari total anggaran **18.313.979.000** (delapan belas milyar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

4.2. Saran

Direktorat Kearsipan Pusat dapat berkoordinasi serta melibatkan unit-unit kerja lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023. Demikian Laporan kinerja ini kami susun sebagai pertanggungjawaban kegiatan realisasi fisik dan realisasi keuangan Direktorat Kearsipan Pusat Tahun anggaran 2023.

Jakarta, 8 Januari 2024

Direktur Kearsipan Pusat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Imam Mulyantono', with a horizontal line underneath the name.

M Imam Mulyantono

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Imam Mulyantono
Jabatan : Direktur Kearsipan Pusat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Desi Pratiwi
Jabatan : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Kedua,

Desi Pratiwi

Pihak Pertama,

M. Imam Mulyantono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Anggaran (Rp):

18.650.679.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyelamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyelamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Kedua,



Desi Pratiwi

Pihak Pertama,



M. In'am Mulyantono

Perjanjian Kinerja Direktur Kearsipan Pusat
Revisi Kesatu



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
REVISI KE-1**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imam Mulyantono

Jabatan : Direktur Kearsipan Pusat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Desi Pratiwi

Jabatan : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2023

Pihak Kedua,



Desi Pratiwi

Pihak Pertama,



M. Imam Mulyantono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Anggaran (Rp):

18.625.829.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyelamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyelamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga

Jakarta, 14 November 2023

Pihak Kedua,



Desi Pratiwi

Pihak Pertama,



M. Imam Mulyantono

Perjanjian Kinerja Direktur Kearsipan Pusat
Revisi Kedua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
REVISI KE-2**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Imam Mulyantono
Jabatan : Direktur Kearsipan Pusat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Desi Pratiwi
Jabatan : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2022

Pihak Kedua,

Desi Pratiwi

Pihak Pertama,

M. Imam Mulyantono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp):

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

18.593.729.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyelamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyelamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga


Jakarta, 4 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Desi Pratiwi



M. Imam Mulyantoro

Perjanjian Kinerja Direktur Kearsipan Pusat
Revisi Ketiga



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
REVISI KE-3**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Imam Mulyantono
Jabatan : Direktur Kearsipan Pusat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Desi Pratiwi
Jabatan : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2023

Pihak Kedua,

Desi Pratiwi

Pihak Pertama,

M. Imam Mulyantono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	1. Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp):

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

18.313.979.000

Non-APBN

1. Penyiapan Pemindahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat ke Ibu Kota Nusantara :
 - a. Pengendalian Digitalisasi Arsip Dinamis
 - b. Penataan Sistem dan Arsip Dinamis
 - c. Penyelamatan Arsip Inaktif
 - d. Penyelamatan Arsip Aset Kementerian/Lembaga
 - e. Pengelolaan Arsip Pertanahan
2. Tertib Arsip Kementerian/Lembaga

Jakarta, 12 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Desi Pratiwi



M. Inam Mulyantono

Lampiran 2

Rencana Aksi Direktorat Kearsipan Pusat


Tahun Anggaran 2023

RENCANA AKSI DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET			
					I	II	III	IV
1	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional							
A	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	13,02				13,02 indeks
			- Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15 Lembaga (Rp. 151.140.000)	Identifikasi instansi pemerintah yang akan menerima pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	Rakor Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	Evaluasi Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset
			- Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	31 Lembaga (Rp. 169.539.000)	Rapat Hybrid Fasilitasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan kepada 31 Instansi	Pendampingan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			- Instansi Pusat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbasis Elektronik (SRIKANDI)	53 Lembaga (Rp. 1.000.000.000)	Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI secara daring	Pelatihan Tenaga Pembimbing Penerapan Aplikasi. Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI
			- Instansi Pusat yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan pemindahan IKN	70 Lembaga (Rp. 15.630.000.000)	Koordinasi Penataan Arsip K/L yang pindah ke IKN, Pengumpulan Data untuk Pelaksanaan Pemataan dan Digitasi Arsip K/L	Bimbingan Teknis Pendamping Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN (Penataan Arsip dan Entry Data ke SRIKANDI, Digitasi Arsip secara Terselektif)	Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET			
					I	II	III	IV
B	Koordinasi	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat	- Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	4 Kegiatan (1.700.000.000)	Koordinasi Nasional Percepatan Penerapan SRIKANDI	Koordinasi Penguatan Tata Kelola Percepatan Penerapan SRIKANDI	Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Aplikasi SRIKANDI
						Koordinasi Layanan Aplikasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	Koordinasi Pengembangan SDM Percepatan Penerapan SRIKANDI	

Jakarta, Desember 2022
Direktur Kearsipan Pusat,



M. Imam Mulyantono

Lampiran 3

LAPORAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SD TRIWULAN IV

Bulan Oktober tahun 2023

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL

Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,700,000,000	0	923,961,011	0	923,961,011	54.35 %	776,038,989
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1,700,000,000	0	923,961,011	0	923,961,011	54.35 %	776,038,989
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	1,700,000,000	0	923,961,011	0	923,961,011	54.35 %	776,038,989
PEA Koordinasi	1,700,000,000	0	923,961,011	0	923,961,011	54.35 %	776,038,989
PEA.001 Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	1,700,000,000	0	923,961,011	0	923,961,011	54.35 %	776,038,989
051 Persiapan	352,550,000	0	351,719,290	0	351,719,290	99.76 %	830,710
052 Pelaksanaan	1,231,895,000	0	572,241,721	0	572,241,721	46.45 %	659,653,279
053 Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Aplikasi SRIKANDI	115,555,000	0	0	0	0	0.00 %	115,555,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL

Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	16,350,250,000	0	13,553,912,404	2,451,950,000	16,005,862,404	97.89 %	344,387,596
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	16,350,250,000	0	13,553,912,404	2,451,950,000	16,005,862,404	97.89 %	344,387,596
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	16,350,250,000	0	13,553,912,404	2,451,950,000	16,005,862,404	97.89 %	344,387,596
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	16,350,250,000	0	13,553,912,404	2,451,950,000	16,005,862,404	97.89 %	344,387,596
QDB.001 Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1,000,000,000	0	801,646,504	0	801,646,504	80.16 %	198,353,496
051 Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI	108,420,000	0	97,970,000	0	97,970,000	90.36 %	10,450,000
052 Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	147,385,000	0	76,600,000	0	76,600,000	51.97 %	70,785,000
053 Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI	575,964,000	0	569,988,250	0	569,988,250	98.96 %	5,975,750
054 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI	168,231,000	0	57,088,254	0	57,088,254	33.93 %	111,142,746
QDB.002 Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN	15,350,250,000	0	12,752,265,900	2,451,950,000	15,204,215,900	99.05 %	146,034,100
051 Persiapan Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	749,485,000	0	607,015,900	1,950,000	608,965,900	81.25 %	140,519,100
052 Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	14,599,450,000	0	12,145,250,000	2,450,000,000	14,595,250,000	99.97 %	4,200,000
053 Pemantauan dan Evaluasi	1,315,000	0	0	0	0	0.00 %	1,315,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
BDB.001 Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	112,790,000	0	87,943,000	0	87,943,000	77.97 %	24,847,000
051 Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional	22,400,000	0	7,000,000	0	7,000,000	31.25 %	15,400,000
052 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	84,790,000	0	75,447,000	0	75,447,000	88.98 %	9,343,000
053 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga	5,600,000	0	5,496,000	0	5,496,000	98.14 %	104,000
BDB.002 Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	150,939,000	0	138,594,164	0	138,594,164	91.82 %	12,344,836
051 Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	145,339,000	0	133,021,700	0	133,021,700	91.53 %	12,317,300
052 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	5,600,000	0	5,572,464	0	5,572,464	99.51 %	27,536

LAPORAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SD TRIWULAN IV

Bulan November tahun 2023

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode November 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
BDB.001 Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	112,790,000	0	87,943,000	0	87,943,000	77.97 %	24,847,000
051 Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional	22,400,000	0	7,000,000	0	7,000,000	31.25 %	15,400,000
052 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	84,790,000	0	75,447,000	0	75,447,000	88.98 %	9,343,000
053 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga	5,600,000	0	5,496,000	0	5,496,000	98.14 %	104,000
BDB.002 Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	150,939,000	0	138,594,164	0	138,594,164	91.82 %	12,344,836
051 Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	145,339,000	0	133,021,700	0	133,021,700	91.53 %	12,317,300
052 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	5,600,000	0	5,572,464	0	5,572,464	99.51 %	27,536

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode November 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,700,000,000	0	923,961,011	427,363,300	1,351,324,311	79.49 %	348,675,689
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1,700,000,000	0	923,961,011	427,363,300	1,351,324,311	79.49 %	348,675,689
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	1,700,000,000	0	923,961,011	427,363,300	1,351,324,311	79.49 %	348,675,689
PEA Koordinasi	1,700,000,000	0	923,961,011	427,363,300	1,351,324,311	79.49 %	348,675,689
PEA.001 Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	1,700,000,000	0	923,961,011	427,363,300	1,351,324,311	79.49 %	348,675,689
051 Persiapan	352,550,000	0	351,719,290	0	351,719,290	99.76 %	830,710
052 Pelaksanaan	1,231,895,000	0	572,241,721	343,573,300	915,815,021	74.34 %	316,079,979
053 Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Aplikasi SRIKANDI	115,555,000	0	0	83,790,000	83,790,000	72.51 %	31,765,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode November 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	16,350,250,000	0	16,005,862,404	16,855,004	16,022,717,408	98.00 %	327,532,592
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	16,350,250,000	0	16,005,862,404	16,855,004	16,022,717,408	98.00 %	327,532,592
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	16,350,250,000	0	16,005,862,404	16,855,004	16,022,717,408	98.00 %	327,532,592
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	16,350,250,000	0	16,005,862,404	16,855,004	16,022,717,408	98.00 %	327,532,592
QDB.001 Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1,000,000,000	0	801,646,504	0	801,646,504	80.16 %	198,353,496
051 Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI	108,420,000	0	97,970,000	0	97,970,000	90.36 %	10,450,000
052 Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	147,385,000	0	76,600,000	0	76,600,000	51.97 %	70,785,000
053 Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI	575,964,000	0	569,988,250	0	569,988,250	98.96 %	5,975,750
054 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI	168,231,000	0	57,088,254	0	57,088,254	33.93 %	111,142,746
QDB.002 Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN	15,350,250,000	0	15,204,215,900	16,855,004	15,221,070,904	99.16 %	129,179,096
051 Persiapan Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	749,485,000	0	608,965,900	16,855,004	625,820,904	83.50 %	123,664,096
052 Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	14,599,450,000	0	14,595,250,000	0	14,595,250,000	99.97 %	4,200,000
053 Pemantauan dan Evaluasi	1,315,000	0	0	0	0	0.00 %	1,315,000

LAPORAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SD TRIWULAN IV

Bulan Desember tahun 2023

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	263,729,000	0	226,537,164	0	226,537,164	85.90 %	37,191,836
BDB.001 Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	112,790,000	0	87,943,000	0	87,943,000	77.97 %	24,847,000
051 Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional	22,400,000	0	7,000,000	0	7,000,000	31.25 %	15,400,000
052 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	84,790,000	0	75,447,000	0	75,447,000	88.98 %	9,343,000
053 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga	5,600,000	0	5,496,000	0	5,496,000	98.14 %	104,000
BDB.002 Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	150,939,000	0	138,594,164	0	138,594,164	91.82 %	12,344,836
051 Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	145,339,000	0	133,021,700	0	133,021,700	91.53 %	12,317,300
052 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	5,600,000	0	5,572,464	0	5,572,464	99.51 %	27,536

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	16,350,250,000	0	16,022,717,408	185,915,000	16,208,632,408	99.13 %	141,617,592
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	16,350,250,000	0	16,022,717,408	185,915,000	16,208,632,408	99.13 %	141,617,592
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	16,350,250,000	0	16,022,717,408	185,915,000	16,208,632,408	99.13 %	141,617,592
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	16,350,250,000	0	16,022,717,408	185,915,000	16,208,632,408	99.13 %	141,617,592
QDB.001 Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1,000,000,000	0	801,646,504	166,315,000	967,961,504	96.80 %	32,038,496
051 Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI	108,420,000	0	97,970,000	0	97,970,000	90.36 %	10,450,000
052 Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	147,385,000	0	76,600,000	67,435,000	144,035,000	97.73 %	3,350,000
053 Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI	575,964,000	0	569,988,250	0	569,988,250	98.96 %	5,975,750
054 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI	168,231,000	0	57,088,254	98,880,000	155,968,254	92.71 %	12,262,746
QDB.002 Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN	15,350,250,000	0	15,221,070,904	19,600,000	15,240,670,904	99.29 %	109,579,096
051 Persiapan Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	749,485,000	0	625,820,904	19,600,000	645,420,904	86.12 %	104,064,096
052 Pelaksanaan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke IKN	14,599,450,000	0	14,595,250,000	0	14,595,250,000	99.97 %	4,200,000
053 Pemantauan dan Evaluasi	1,315,000	0	0	0	0	0.00 %	1,315,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,700,000,000	0	1,351,324,311	295,070,000	1,646,394,311	96.85 %	53,605,689
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1,700,000,000	0	1,351,324,311	295,070,000	1,646,394,311	96.85 %	53,605,689
CN.6660 Pembinaan Kearsipan Nasional	1,700,000,000	0	1,351,324,311	295,070,000	1,646,394,311	96.85 %	53,605,689
PEA Koordinasi	1,700,000,000	0	1,351,324,311	295,070,000	1,646,394,311	96.85 %	53,605,689
PEA.001 Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	1,700,000,000	0	1,351,324,311	295,070,000	1,646,394,311	96.85 %	53,605,689
051 Persiapan	352,550,000	0	351,719,290	0	351,719,290	99.76 %	830,710
052 Pelaksanaan	1,231,895,000	0	915,815,021	273,650,000	1,189,465,021	96.56 %	42,429,979
053 Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Aplikasi SRIKANDI	115,555,000	0	83,790,000	21,420,000	105,210,000	91.05 %	10,345,000

Lampiran 4

LAPORAN CAPAIAN FISIK PADA TRIWULAN IV

TAHUN ANGGARAN 2023

Bulan Oktober tahun 2023

DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (CAPAIAN OUTPUT)
Periode Oktober 2023

Kementerian : 02 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 49048 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Urutan	PAU/REVI (Lampiran 6)	REALISASI KEUANGAN				SISA ANGGARAN	TARGET OUTPUT	REALISASI FISIK/CAPAIAN OUTPUT				Hambatan Pelaksanaan	Tindak Lanjut Hambatan
		s.d. SEPTEMBER		OKTOBER				s.d. SEPTEMBER	OKTOBER	Progres %	Progres %		
		(Rp)-	%	(Rp)-	%								
0000	Pembinaan Kearsipan Nasional	16.826.438.000	14.857.416.578	74,04%	2.461.416.840	13,14%	1.024.208.427						
000	Realisasi dan Pelaksanaan Lembaga	245.429.000	226.537.144	76,54%	0	0,00%	69.291.874	45 Lembaga	45	100,00%	0	0,00%	
000.001	Penyempurnaan Fasilitas yang Mendukung Praktek/kegiatan Pengarsipan Arsip Berupa dan Arsip Aot	124.290.000	87.810.000	69,84%	0	0,00%	24.247.000	17 Lembaga	17	100,00%	0	0,00%	
001	Instalasi Sistem Pengarsipan yang akan menunjang Pelaksanaan Pengarsipan Arsip Temporer dan Arsip Nasional	35.300.000	7.000.000	19,55%	0	0,00%	28.500.000						
001.BA	JANFA SUB KOMPONEN	35.300.000	7.000.000	19,55%	0	0,00%	28.500.000						
001.001	Penyediaan Sistem Pengarsipan Arsip Temporer dan Arsip Nasional	84.750.000	72.447.000	85,61%	0	0,00%	9.313.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	84.750.000	72.447.000	85,61%	0	0,00%	9.313.000						
002	Tukang Kapasiter Pembinaan Pengarsipan Arsip dan Arsip Temporer	2.500.000	2.494.000	99,36%	0	0,00%	104.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	2.500.000	2.494.000	99,36%	0	0,00%	104.000						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas yang Mendukung Praktek/kegiatan Pengarsipan Arsip Temporer dan Arsip Nasional	149.539.000	138.594.144	92,75%	0	0,00%	39.944.824	31 Lembaga	31	100,00%	0	0,00%	
001	Pembinaan Fasilitas Layanan Kearsipan Hasil Pengarsipan	141.339.000	137.621.700	97,47%	0	0,00%	39.947.100						
001.BA	JANFA SUB KOMPONEN	141.339.000	137.621.700	97,47%	0	0,00%	39.947.100						
002	Tukang Kapasiter Pembinaan Teknik Lanjutan Hasil Pengarsipan	5.500.000	5.572.444	101,32%	0	0,00%	27.534						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	5.500.000	5.572.444	101,32%	0	0,00%	27.534						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas yang Mendukung Praktek/kegiatan Pengarsipan Arsip Temporer dan Arsip Nasional	1.700.500.000	857.141.011	50,42%	0	0,00%	842.938.999	4 Kegiatan	4	75,00%	0	0,00%	
001	Penyempurnaan Fasilitas Pengarsipan SERANDE	1.700.500.000	857.141.011	50,42%	0	0,00%	842.938.999	4 Kegiatan	4	75,00%	0	0,00%	
001.001	Penyempurnaan Fasilitas Pengarsipan SERANDE	312.500.000	311.718.290	99,74%	0	0,00%	850.710						
001.BA	JANFA SUB KOMPONEN	312.500.000	311.718.290	99,74%	0	0,00%	850.710						
002	Pembinaan	1.211.499.000	605.444.721	50,00%	0	0,00%	729.451.279						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	1.211.499.000	605.444.721	50,00%	0	0,00%	729.451.279						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	289.175.000	67.226.521	23,25%	0	0,00%	229.948.479						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	289.175.000	67.226.521	23,25%	0	0,00%	229.948.479						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	321.750.000	311.465.590	96,83%	0	0,00%	18.284.500						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	321.750.000	311.465.590	96,83%	0	0,00%	18.284.500						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	125.750.000	14.465.700	11,46%	0	0,00%	111.284.300						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	125.750.000	14.465.700	11,46%	0	0,00%	111.284.300						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	496.250.000	912.240.000	183,84%	0	0,00%	383.940.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	496.250.000	912.240.000	183,84%	0	0,00%	383.940.000						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
000	Realisasi dan Pelaksanaan Lembaga	16.670.909.000	13.573.812.434	81,56%	2.471.936.000	14,74%	624.177.596	123 Lembaga, Unit Kerja, Tim	123	99,00%	0	0,00%	
000.001	Penyempurnaan Fasilitas yang Mendukung Praktek/kegiatan Pengarsipan Arsip Berupa dan Arsip Aot	1.800.500.000	861.641.594	47,86%	0	0,00%	198.214.499	17 Lembaga	17	100,00%	0	0,00%	
001	Penyempurnaan Fasilitas Pengarsipan SERANDE	148.420.000	97.870.000	66,01%	0	0,00%	10.450.000						
001.BA	JANFA SUB KOMPONEN	148.420.000	97.870.000	66,01%	0	0,00%	10.450.000						
001.001	Penyempurnaan Fasilitas Pengarsipan SERANDE	148.420.000	97.870.000	66,01%	0	0,00%	10.450.000						
002	Pembinaan	1.211.499.000	605.444.721	50,00%	0	0,00%	729.451.279						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	1.211.499.000	605.444.721	50,00%	0	0,00%	729.451.279						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	289.175.000	67.226.521	23,25%	0	0,00%	229.948.479						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	289.175.000	67.226.521	23,25%	0	0,00%	229.948.479						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	321.750.000	311.465.590	96,83%	0	0,00%	18.284.500						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	321.750.000	311.465.590	96,83%	0	0,00%	18.284.500						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	125.750.000	14.465.700	11,46%	0	0,00%	111.284.300						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	125.750.000	14.465.700	11,46%	0	0,00%	111.284.300						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	496.250.000	912.240.000	183,84%	0	0,00%	383.940.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	496.250.000	912.240.000	183,84%	0	0,00%	383.940.000						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	117.515.000	0	0,00%	0	0,00%	117.515.000						
000	Realisasi dan Pelaksanaan Lembaga	16.670.909.000	13.573.812.434	81,56%	2.471.936.000	14,74%	624.177.596	123 Lembaga, Unit Kerja, Tim	123	99,00%	0	0,00%	
000.001	Penyempurnaan Fasilitas yang Mendukung Praktek/kegiatan Pengarsipan Arsip Berupa dan Arsip Aot	1.800.500.000	861.641.594	47,86%	0	0,00%	198.214.499	17 Lembaga	17	100,00%	0	0,00%	
001	Penyempurnaan Fasilitas Pengarsipan SERANDE	148.420.000	97.870.000	66,01%	0	0,00%	10.450.000						
001.BA	JANFA SUB KOMPONEN	148.420.000	97.870.000	66,01%	0	0,00%	10.450.000						
001.001	Penyempurnaan Fasilitas Pengarsipan SERANDE	148.420.000	97.870.000	66,01%	0	0,00%	10.450.000						
002	Pembinaan	1.211.499.000	605.444.721	50,00%	0	0,00%	729.451.279						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	1.211.499.000	605.444.721	50,00%	0	0,00%	729.451.279						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	289.175.000	67.226.521	23,25%	0	0,00%	229.948.479						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	289.175.000	67.226.521	23,25%	0	0,00%	229.948.479						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	321.750.000	311.465.590	96,83%	0	0,00%	18.284.500						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	321.750.000	311.465.590	96,83%	0	0,00%	18.284.500						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	125.750.000	14.465.700	11,46%	0	0,00%	111.284.300						
002.BA	JANFA SUB KOMPONEN	125.750.000	14.465.700	11,46%	0	0,00%	111.284.300						
002.002	Penyempurnaan Fasilitas Layanan Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan SERANDE	496.250.000	912.240.000										

Lampiran 4

LAPORAN CAPAIAN FISIK PADA TRIWULAN IV


TAHUN ANGGARAN 2023

Bulan Desember tahun 2023

DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (CAPAIAN OUTPUT)
Periode Desember 2023

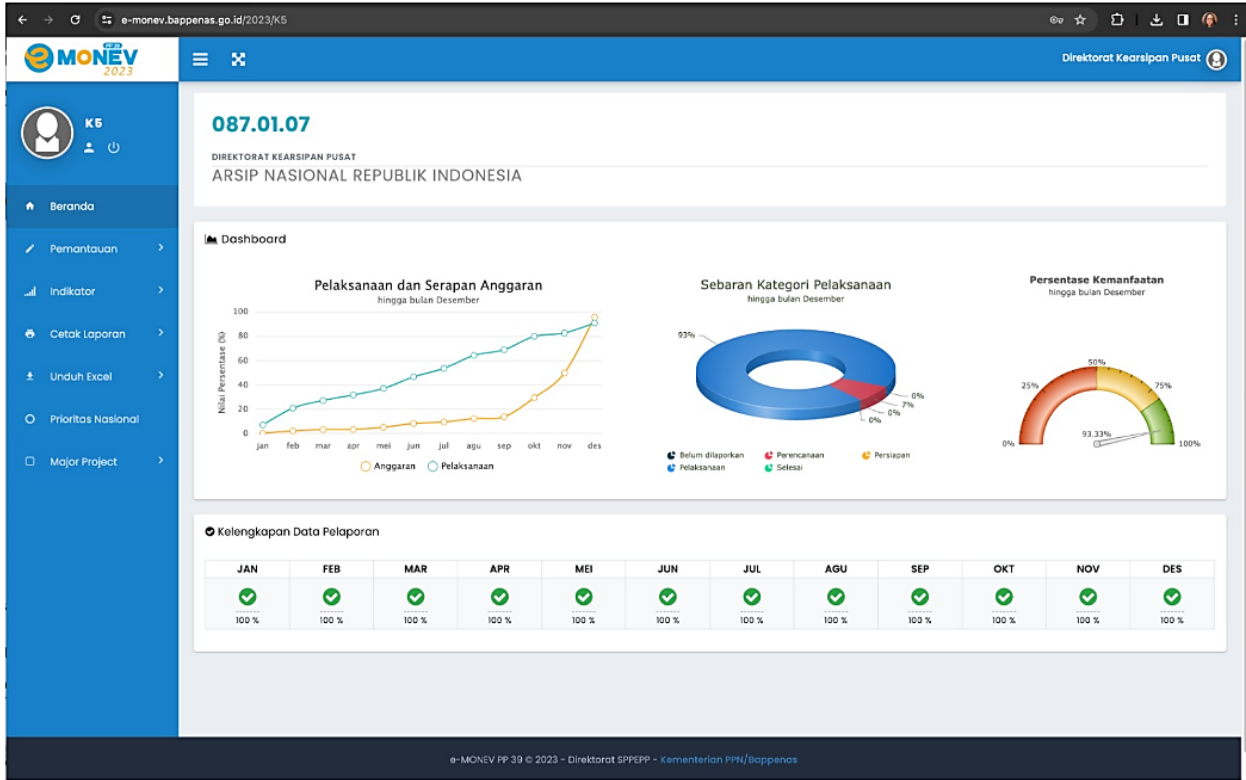
Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Sesuai Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL RI JAKARTA

Uraian	PAGU REVISI (Rupiah)	REALISASI KEUANGAN				BISA ANGGARAN	TARGET OUTPUT	REALISASI FISIK/CAPAIAN OUTPUT				Hambatan Pelaksanaan	Tindak Lanjut Hambatan
		s.d. NOVEMBER		DESEMBER				s.d. NOVEMBER		DESEMBER			
		(Rp.)	%	(Rp.)	%			Volume Capaian	Progres %	Volume Capaian	Progres %		
04.000 Pembinaan Kearsipan Nasional	18.213.578.000	17.600.578.083	96,15 %	493.000.000	2,63 %	222.415.117							
04.01 Fasilitas dan Peralatan Lapangan	204.720.000	228.331.184	111,95 %		0,00 %	37.091.833	46 Lembar	100,00 %	0	0,00 %			
04.01.01 Lembara Perantara yang Memerintahkan Pengiriman Asap Ditinjau dari Asap Asap	112.700.000	97.943.380	87,00 %	0	0,00 %	24.941.093	15 Lembar	100,00 %	0	0,00 %			
04.01.02 Identifikasi Instruksi Perantara yang akan menerima Penerimaan Pengiriman Asap Ditinjau dari Asap Asap Nasional	22.400.000	7.000.000	31,25 %	0	0,00 %	15.400.000							
04.01.03 TAMPAS SUB KOMPOSISI	22.400.000	7.000.000	31,25 %	0	0,00 %	15.400.000							
04.01.04 Penyediaan Tindakan Pengiriman Asap Ditinjau dari Asap Asap Nasional	66.700.000	70.441.800	105,61 %	0	0,00 %	9.140.900							
04.01.05 TAMPAS SUB KOMPOSISI	84.700.000	75.447.000	89,08 %	0	0,00 %	9.240.000							
04.01.06 Tindakan Kegiatan Pembinaan Pengiriman Asap Asap dan Asap Terjaga	5.900.000	5.496.000	93,15 %	0	0,00 %	100.000							
04.01.07 TAMPAS SUB KOMPOSISI	5.900.000	5.496.000	93,15 %	0	0,00 %	100.000							
04.01.08 Lembara Perantara yang Memerintahkan Pengiriman Asap Ditinjau dari Asap Asap Nasional	150.800.000	138.044.144	91,54 %	0	0,00 %	17.144.833	31 Lembar	100,00 %	0	0,00 %			
04.01.09 Tindakan Tindakan Sertifikasi dan Dokumentasi Hasil Pengiriman	140.100.000	133.011.300	95,00 %	0	0,00 %	17.111.000							
04.01.10 TAMPAS SUB KOMPOSISI	140.100.000	133.011.300	95,00 %	0	0,00 %	17.111.000							
04.01.11 Tindakan Kegiatan Pembinaan Tindakan Lembar Hasil Pengiriman	5.900.000	5.572.464	94,45 %	0	0,00 %	27.576							
04.01.12 TAMPAS SUB KOMPOSISI	5.900.000	5.572.464	94,45 %	0	0,00 %	27.576							
04.02 Koordinasi	1.700.000.000	1.314.124.111	77,26 %	205.870.000	17,30 %	51.905.493	4 Kegiatan	100,00 %	0	0,00 %			
04.02.01 Koordinasi Penerimaan Pengiriman BERLANDAS	1.700.000.000	1.314.124.111	77,26 %	205.870.000	17,30 %	51.905.493	4 Kegiatan	100,00 %	0	0,00 %			
04.02.02 Penerimaan	552.850.000	121.710.200	21,99 %	0	0,00 %	810.138							
04.02.03 TAMPAS SUB KOMPOSISI	552.850.000	121.710.200	21,99 %	0	0,00 %	810.138							
04.02.04 Pelaksanaan	1.211.400.000	1.192.413.911	98,44 %	205.870.000	22,21 %	42.095.355							
04.02.05 Koordinasi Pengiriman Tim Asap Perantara Penerimaan BERLANDAS	208.450.000	231.206.521	110,54 %	40.300.000	19,34 %	8.848.478						Tidak dilaksanakan tepat karena pengiriman tim tidak terencana sebelumnya BERLANDAS	
04.02.06 Koordinasi Layanan Aplikasi Penerimaan Pengiriman BERLANDAS	323.750.000	311.400.500	96,18 %	0	0,00 %	10.200.000							
04.02.07 Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerimaan	121.400.000	90.197.500	74,29 %	20.150.000	16,59 %	3.064.500						Tidak dilaksanakan tepat karena tidak ada informasi dan komunikasi sebelumnya penerimaan BERLANDAS	
04.02.08 Penerimaan BERLANDAS	121.400.000	90.197.500	74,29 %	20.150.000	16,59 %	3.064.500							
04.02.09 Koordinasi Pengiriman SIM Penerimaan Pengiriman BERLANDAS	406.250.000	274.845.500	67,65 %	201.200.000	49,54 %	20.106.750						Tidak dilaksanakan tepat karena pengiriman SIM Penerimaan Pengiriman BERLANDAS	
04.02.10 Koordinasi dan Pelaksanaan Aplikasi BERLANDAS	115.550.000	65.700.000	56,93 %	21.420.000	18,54 %	10.547.000							
04.02.11 TAMPAS SUB KOMPOSISI	115.550.000	65.700.000	56,93 %	21.420.000	18,54 %	10.547.000							
04.03 Fasilitas dan Peralatan Lapangan	66.700.250.000	68.822.717.400	103,18 %	182.910.000	1,14 %	141.617.212	123 Lembar Lembar Kerja, Tim	100,00 %	100,00 %	0	0,00 %		
04.03.01 Lembar Kerja yang Memerintahkan Aplikasi Keperluan Berpang Pita Berpang Pita Keperluan Berpang Pita	1.800.000.000	301.140.504	16,73 %	140.110.000	7,78 %	37.018.444	37 Lembar	100,00 %	0	0,00 %			
04.03.02 Tindakan Penerimaan Aplikasi BERLANDAS	100.450.000	97.970.000	97,53 %	0	0,00 %	18.450.000							
04.03.03 Penerimaan Fasilitas	100.450.000	97.970.000	97,53 %	0	0,00 %	18.450.000							
04.03.04 Tindakan Kegiatan Data Penerimaan Aplikasi BERLANDAS	147.350.000	76.000.000	51,59 %	87.420.000	59,25 %	2.730.000						Tidak dilaksanakan karena kendala penyalangan ke tipe unit dan penyalangan ke tipe BERLANDAS dengan menggunakan sistem yang sudah terpasang tahun 2022	
04.03.05 TAMPAS SUB KOMPOSISI	147.350.000	76.000.000	51,59 %	87.420.000	59,25 %	2.730.000							
04.03.06 Tindakan Tindakan Penerimaan Penerimaan Aplikasi BERLANDAS	575.960.000	509.500.521	88,46 %	0	0,00 %	2.075.750							
04.03.07 TAMPAS SUB KOMPOSISI	575.960.000	509.500.521	88,46 %	0	0,00 %	2.075.750							
04.03.08 Tindakan dan Fasilitas Penerimaan Aplikasi BERLANDAS	140.210.000	97.000.500	69,25 %	90.000.000	64,26 %	15.262.100						Tidak dilaksanakan tepat karena belum selesai penyalangan ke tipe BERLANDAS	
04.03.09 TAMPAS SUB KOMPOSISI	140.210.000	97.000.500	69,25 %	90.000.000	64,26 %	15.262.100							
04.03.10 Lembara Perantara yang Memerintahkan Pengiriman Asap Ditinjau dari Asap Asap Nasional	13.700.250.000	15.221.870.000	111,10 %	19.600.000	0,14 %	109.270.000	70 Lembar	99,00 %	0	0,00 %			
04.03.11 Penerimaan Pelaksanaan Fasilitas Asap KCL yang Pindah ke IKN	700.400.000	675.420.000	96,45 %	19.600.000	2,79 %	100.000.000							
04.03.12 Koordinasi Penerimaan Asap KCL yang Pindah ke IKN	223.900.000	128.365.900	57,37 %	17.800.000	7,95 %	78.036.100						Tidak dilaksanakan tepat karena koordinasi Asap KCL yang pindah ke IKN untuk penyalangan ke tipe	
04.03.13 Tindakan Tindakan Penerimaan Penerimaan Asap KCL yang Pindah ke IKN	428.450.000	427.422.000	99,77 %	0	0,00 %	1.004.900							
04.03.14 Penerimaan Data untuk Pelaksanaan Penerimaan Asap KCL yang Pindah ke IKN	97.150.000	70.022.000	72,08 %	2.100.000	2,16 %	18.222.000						Tidak dilaksanakan kegiatan awal yang akan penyalangan ke tipe Asap KCL yang pindah ke IKN	
04.03.15 Pelaksanaan Penerimaan Asap KCL yang Pindah ke IKN	14.000.000.000	14.000.000.000	100,00 %	0	0,00 %	4.700.000							
04.03.16 Penerimaan Asap dan Tindakan Data ke BERLANDAS	12.147.250.000	12.147.250.000	100,00 %	0	0,00 %	2.100.000							
04.03.17 Penerimaan Asap untuk Tindakan	2.452.100.000	2.450.000.000	99,92 %	0	0,00 %	2.100.000							
04.03.18 Penerimaan dan Fasilitas	1.310.000	0	0,00 %	0	0,00 %	213.000							
04.03.19 TAMPAS SUB KOMPOSISI	1.310.000	0	0,00 %	0	0,00 %	1.310.000							

Jakarta, 4 Januari 2024
Mengetahui,
Direktur Kearsipan Pusat

Imam Mulyantono
NIP. 196512011994031001

Lampiran 5

PRINT OUT LAPORAN MONEV PERIODE S.D TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023



Lampiran 6

Rekap Pelaporan Komponen

REKAP PELAPORAN KOMPONEN OKTOBER (PARSIAL)

Tahun : 2023

K/L : 0B7 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UK. Eselon I : 01 - Arsip Nasional

UK. Eselon II : 07 - Direktorat Kearsipan Pusat

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIII	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6660.BDB.001 - Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset														
1	051 Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional	Pelaksanaan	telah dilaksanakan rapat identifikasi instansi pemerintah yang pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional	80.00 %	Laporan	1	0		22,400,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	masih perencanaan untuk identifikasi instansi pemerintah yang pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional yang terkait dengan instansi yang telah dibina serta inventaris masalahnya
2	052 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	Pelaksanaan	telah diadakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional kepada instansi pusat	90.00 %	Lembaga	15	0		84,790,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	sedang dilakukan koordinasi untuk tindak lanjut bintek pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional kepada instansi pusat
3	053 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga	Pelaksanaan	telah diadakan rapat evaluasi terkait kegiatan pengelolaan arsip aset dan arsip terjaga yang telah diselenggarakan sebelumnya	90.00 %	Laporan	1	0		5,600,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	sedang dalam koordinasi untuk melakukan survei lapangan terhadap instansi yang menerima pendampingan pengelolaan arsip aset dan arsip terjaga
6660.BDB.002 - Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan														

8 Jan 2024

1/6

Rekap Komponen Oktober (Parsial)

REKAP PELAPORAN KOMPONEN NOVEMBER (PARSIAL)

Tahun : 2023

K/L : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UK. Eselon I : 01 - Arsip Nasional

UK. Eselon II : 07 - Direktorat Kearsipan Pusat

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6660.BDB.001 - Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset														
1	051 Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional	Pelaksanaan	telah dilaksanakan rapat identifikasi instansi instansi pemerintah yang pendampingan pegelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional	85.00 %	Laporan	1	0		22,400,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	masih perencanaan untuk identifikasi instansi pemerintah yang pendampingan pegelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional yang terkait dengan instansi yang telah dibina serta inventaris masalahnya
2	052 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	Pelaksanaan	telah diadakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional kepada instansi pusat	90.00 %	Lembaga	15	0		84,790,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	sedang dilakukan koordinasi untuk tindak lanjut bimtek pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional kepada instansi pusat
3	053 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga	Pelaksanaan	telah diadakan rapat evaluasi terkait kegiatan pengelolaan arsip aset dan arsip terjaga yang telah diselenggarakan sebelumnya	90.00 %	Laporan	1	0		5,600,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	sedang dalam koordinasi untuk melakukan survei lapangan terhadap instansi yang menerima pendampingan pengelolaan arsip aset dan arsip terjaga
6660.BDB.002 - Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan														

REKAP PELAPORAN KOMPONEN DESEMBER (PARSIAL)

Tahun : 2023
 K/L : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 UK. Eselon I : 01 - Arsip Nasional
 UK. Eselon II : 07 - Direktorat Kearsipan Pusat

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6660.BDB.001 - Lembaga Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset														
1	051 Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional	Pelaksanaan	telah dilaksanakan rapat identifikasi instansi instansi pemerintah yang pendampingan pegelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional	97.00 %	Laporan	1	1		22,400,000	0	0.00%	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	Identifikasi telah dilakukan untuk instansi yang akan menerima pendampingan arsip terjaga dan arsip aset di tahun 2024, akan diempurnakan pada awal tahun untuk selanjutnya dibuatkan acara terkait pendampingan tersebut
2	052 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pusat	Pelaksanaan	telah diadakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset nasional kepada instansi pusat	97.00 %	Lembaga	15	0		84,790,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tindak lanjut bimbingan teknis pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset dilakukan secara daring melalui whatsapp ke Pj masing-masing, dilakukan berkelanjutan
3	053 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Aset dan Arsip Terjaga	Pelaksanaan	telah diadakan rapat evaluasi terkait kegiatan pengelolaan arsip aset dan arsip terjaga yang telah diselenggarakan sebelumnya	99.00 %	Laporan	1	1		5,600,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	telah dilakukan evaluasi dan akan ditindaklanjuti secara berkelanjutan ke instansi yang menerima pendampingan arsip aset dan arsip terjaga
6660.BDB.002 - Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan														

8 Jan 2024

1/6

Rekap Komponen Desember (Parsial)